



KINERJA BPOM DALAM ANGKA TRIWULAN II TAHUN 2022



BADAN POM



BADAN POM

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN II TAHUN 2022

SAMBUTAN KEPALA BPOM RI

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmad dan RidhoNya sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat melalui jaminan Obat dan Makanan yang aman, berkualitas/bermanfaat, dan bermutu. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dituangkan dalam “Kinerja BPOM Dalam Angka”. Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil - hasil pengawasan Obat dan Makanan.



Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan baik yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standardisasi, evaluasi *pre-market*, hingga pengawasan *post-market* yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, beberapa kinerja yang telah dicapai BPOM di antaranya adalah penerbitan 88.191 NIE, pemeriksaan terhadap 12.452 sarana produksi dan sarana distribusi, pengujian 30.031 sampel, 130 perkara, dan 265 kegiatan pelaksanaan KIE. Tahun 2022 diharapkan menjadi momentum pemulihan ekonomi mengingat pandemi Covid-19 sudah mulai melandai. Untuk mendukung hal tersebut, BPOM semakin intensif dalam melakukan pendampingan terhadap UMKM supaya produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasaran. Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan II Tahun 2022. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.

Jakarta, 25 Agustus 2022

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Penny K. Lukito'.

Dr. Penny K. Lukito, MCP

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BPOM R.I	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
HIGHLIGHT	1
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.....	5
I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan	5
II. Hasil Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan	10
III. Penyusunan Standar/Regulasi/Pedoman	10
IV. Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan	12
V. Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan	13
VI. Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat	15
VII. Digitalisasi Pelayanan Publik.....	25
VIII. Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan	28
IX. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.....	31
X. Kerjasama Internasional	33
XI. Sumber Daya Manusia	34
XII. Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan II 2022	35
XIII. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM	36
PENUTUP	37
LAMPIRAN.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan	5
Gambar 2. Profil Pengawasan iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan	5
Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan	6
Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan	6
Gambar 5. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan	8
Gambar 6. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan.....	8
Gambar 7. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan	9
Gambar 8. Grafik Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia (Januari – Juni 2022).....	10
Gambar 9. Grafik Baku Pembanding yang dikembangkan (Januari – Juni 2022).....	13
Gambar 10. Data Penerbitan Siaran Pers dan Penjelasan/Klarifikasi	13
Gambar 11. Realisasi Kegiatan Pelayanan Informasi kepada Media.....	13
Gambar 12. Pertumbuhan Audiens per Platform pada Triwulan II 2022	13
Gambar 13. <i>Engagement</i> Media Sosial Badan POM	13
Gambar 14. <i>Top engagement content</i> terkait Badan POM pada <i>platform</i> Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube pada Triwulan II.....	13
Gambar 15. Tren Tonasi Pemberitaan	13
Gambar 16. Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media Triwulan II 2022.....	20
Gambar 17. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2022.....	21
Gambar 18. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Profesi	22
Gambar 19. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Jenis Media	23
Gambar 20. Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh Badan POM Berdasarkan Komoditi	23
Gambar 21. Topik Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada Badan POM	24
Gambar 22. Aktivitas dalam Percepatan Implementasi 2D Barcode	25
Gambar 23. Aktivitas pada BPOM Mobile	26
Gambar 24. Tampilan Antarmuka Aplikasi SMARTPOM	28
Gambar 25. Realisasi Anggaran s.d Triwulan II 2022	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Targeted)	7
Tabel 2. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random)	7
Tabel 3. Profil Laporan Efek Samping.....	9
Tabel 4. Rincian Hasil Evaluasi RB.....	31



BADAN POM
HIGHLIGHT

S.D TRIWULAN II TAHUN 2022

Badan POM Berdayakan Mahasiswa dalam Program Pangan Aman Goes to Campus

Jakarta, Kamis (14/04/2022)



Badan POM meluncurkan Program Pangan Aman Goes to Campus (PAGC). Program ini bersinergi dengan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diusung oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Selain bertujuan meningkatkan kompetensi dan partisipasi mahasiswa di bidang keamanan pangan, program ini juga diarahkan untuk memperluas jangkauan pendampingan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pangan olahan melalui pembentukan fasilitator dari komunitas pendidikan tinggi. Program PAGC sendiri merupakan inovasi Badan POM dalam pemberdayaan komunitas intelektual sebagai fasilitator keamanan pangan. Program ini merupakan bentuk komitmen dan keberpihakan Badan POM terhadap UMK pangan olahan dengan harapan semakin banyak produk binaan yang dapat memenuhi persyaratan keamanan pangan dan memperoleh izin edar Badan POM.

KASN Apresiasi Badan POM untuk Capaian Indeks Maturitas Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Tahun 2021

Bandung, Rabu (20/04/2022)

Badan POM berhasil meraih kategori nilai tinggi pada Indeks Maturitas Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku (IM-NKK) Tahun 2021 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua KASN, Agus Pramusinto kepada Kepala Badan POM, Penny K. Lukito pada acara rapat koordinasi Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengusung tema Akselerasi Pengelolaan SDM Berbasis Sistem Merit dalam Mendukung Terwujudnya ASN Badan POM Berkelas Dunia.



Wujudkan SDM Unggul Indonesia Emas, Badan POM Canangkan Jambore Nutrisi Seimbang di Pulau Morotai

Morotai, Jumat (20/05/2022)



Memulai di wilayah terluar Indonesia Timur, yaitu Pulau Morotai, Kepala Badan POM resmikan kegiatan Jambore Nutrisi Seimbang untuk SDM Unggul perdana di Hari Kebangkitan Nasional. Kegiatan ini dilakukan di SDN Unggulan 1 Pulau Morotai, Maluku Utara sebagai forum edukasi bagi komunitas sekolah, khususnya para siswa, untuk dapat menerapkan konsumsi pangan aman dan bernutrisi seimbang.

Peresmian kegiatan Jambore Nutrisi Seimbang untuk SDM Unggul juga bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei. "Kami canangkan program ini dibuka untuk pertama kali di Pulau Morotai di Hari Kebangkitan Nasional", jelas Kepala Badan POM yang hadir langsung membuka kegiatan tersebut.

Badan POM Luncurkan Program Zona Ramah Promosi Online Bagi UMK Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Sebagai upaya dalam memberikan edukasi preventif bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) pada *platform marketplace* agar dapat memahami regulasi terkait obat tradisional (OT) dan suplemen Kesehatan (SK), Badan POM meluncurkan program "**Zona Ramah Promosi Online Usaha Mikro Kecil Obat Tradisional (OT) dan Suplemen Kesehatan (SK)**". Program ini dihadirkan untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi serta kondisi pandemi yang berpengaruh terhadap peningkatan tren peredaran produk secara *online*.

Mengangkat tema "*Promosikan Produknya, Kenali Regulasinya, dan Raih Untungnya*", kegiatan hari ini merupakan hasil kolaborasi Badan POM dengan 8 (delapan) *platform marketplace* di Indonesia, yaitu (1) Tokopedia, (2) Shopee, (3) Elevenia, (4) Bukalapak, (5) Blibli, (6) Lazada, (7) JDID, dan (8) Jakmall, serta didukung Kementerian Komunikasi dan Informatika serta *Indonesian E-Commerce Association* (idEA). Kegiatan ini juga dihadiri oleh peserta yang berasal dari kementerian/lembaga terkait, asosiasi pelaku usaha, perwakilan *platform marketplace* yang mengikuti program, dan *seller* OT dan SK di *marketplace*.

Jakarta, Jumat (27/05/2022)



Peringati Hari Keamanan Pangan Sedunia, Badan POM Lindungi Masyarakat Melalui Regulasi Bisfenol A

Jakarta, Selasa (07/06/2022)



Badan POM selenggarakan sarasehan bertajuk “Upaya Perlindungan Kesehatan Masyarakat Melalui Regulasi Pelabelan Bisfenol A (BPA) pada Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)”. Bertepatan dengan Hari Keamanan Pangan Sedunia, penyelenggaraan sarasehan ini bertujuan memfasilitasi diskusi urgensi keamanan pangan, dalam hal ini keamanan AMDK yang dikonsumsi sehari-hari, melalui pengaturan label terkait BPA guna melindungi kesehatan konsumen.

Saat ini, banyak informasi terkait keamanan BPA pada kemasan plastik polikarbonat (PC) yang berpotensi berdampak pada kesehatan, baik di masyarakat internasional maupun dalam negeri. BPA merupakan salah satu bahan penyusun plastik PC kemasan air minum dalam galon. Pada kondisi tertentu, BPA dapat bermigrasi dari kemasan plastik PC ke dalam air yang dikemasnya.

Temukan Pabrik Tahu Berformalin, Badan POM Tegaskan Sanksi bagi Pelaku

Badan POM melakukan operasi penindakan terhadap sarana produksi pangan olahan yang memproduksi dan mengedarkan tahu mengandung bahan kimia berbahaya formalin di dua lokasi di daerah Parung, Kabupaten Bogor. Operasi ini dilakukan berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat.

Operasi ini berawal dari aduan masyarakat yang masuk ke Badan POM dan ditindaklanjuti oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM. Dalam operasi ini, ditemukan adanya dua sarana produksi tahu yang mengandung formalin. Total omset dari dua sarana produksi tahu tersebut mencapai lebih dari Rp5 miliar per tahun dengan kapasitas produksi lebih dari 2,5 ton. Tahu hasil produksi dari kedua sarana produksi tersebut diketahui banyak didistribusikan ke pasar-pasar di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bogor.

Bogor, Jumat (10/06/2022)





BADAN POM

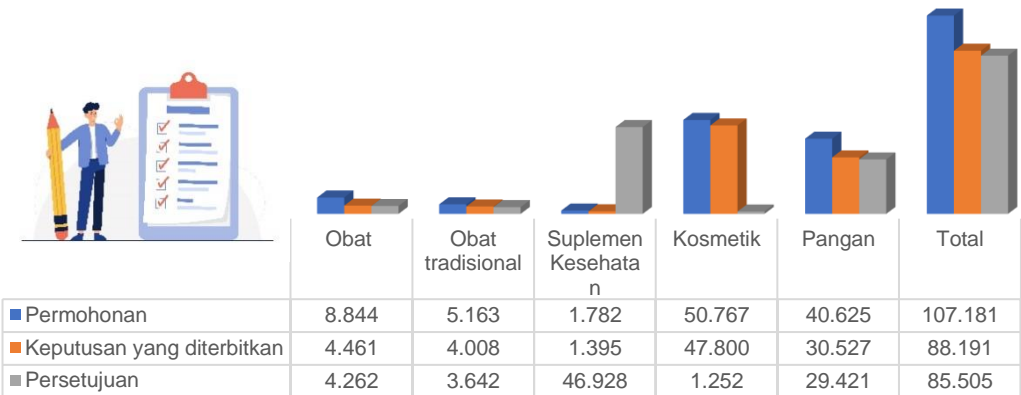
HASIL KEGIATAN
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
S.D TRIWULAN II TAHUN 2022

I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan

Pengawasan *Pre-market*

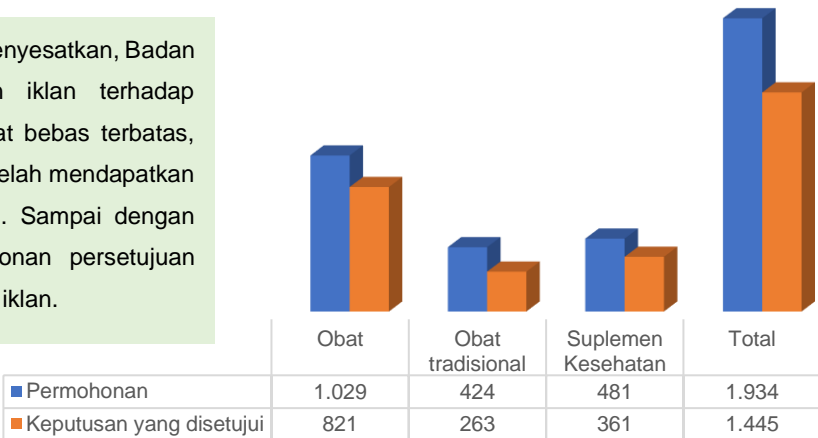
Sebelum Obat dan Makanan diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Indonesia, Obat dan Makanan harus melalui registrasi oleh Badan POM untuk dievaluasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi melalui penandaan/label.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2022, telah diterbitkan 88.191 keputusan dan 85.505 persetujuan izin edar dari 107.181 berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.



Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan

Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, Badan POM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan izin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. Sampai dengan Triwulan II tahun 2022, dari 1.934 permohonan persetujuan rancangan iklan, telah disetujui 1.445 (74,71 %) iklan.



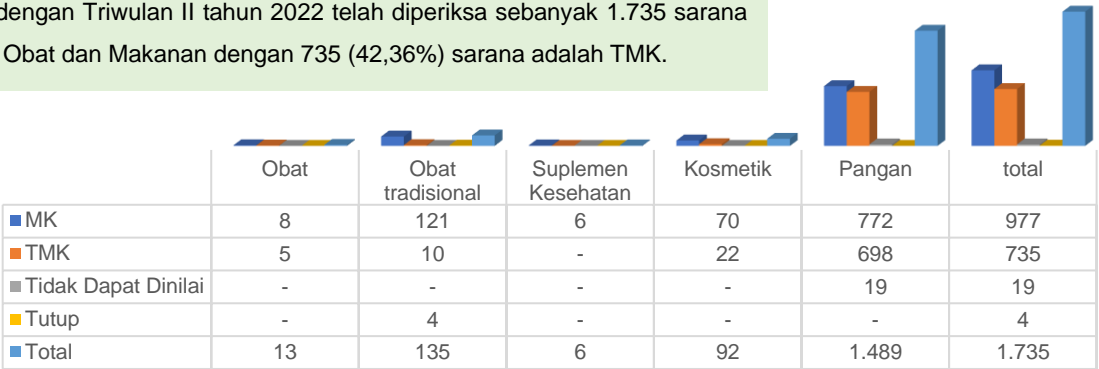
Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan

Pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui :

Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

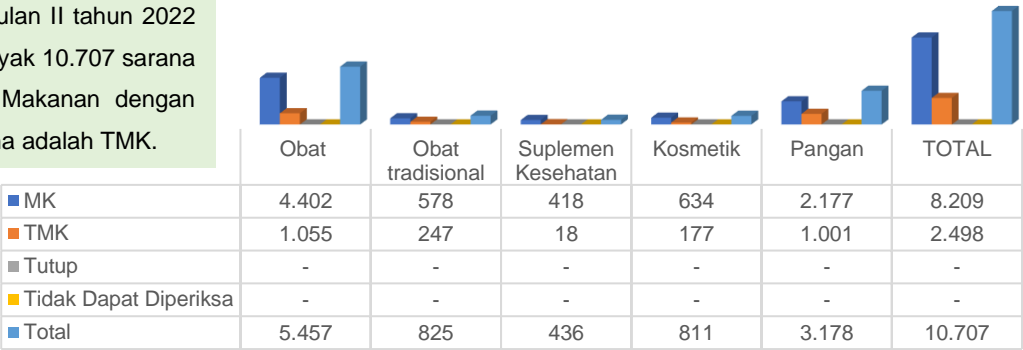
Badan POM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Yang Baik.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2022 telah diperiksa sebanyak 1.735 sarana produksi Obat dan Makanan dengan 735 (42,36%) sarana adalah TMK.



Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Sampai dengan Triwulan II tahun 2022 telah diperiksa sebanyak 10.707 sarana distribusi Obat dan Makanan dengan 2.498 (23,31%) sarana adalah TMK.



Keterangan
TMK : Tidak Memenuhi Ketentuan
MK : Memenuhi Ketentuan

Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan



A. Targeted

Komoditi	Metode Sampling	Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			TIE/Ilegal/Palsu	Kedaluarsa	rusak				MS	TMS*			
		(a)	(b)			(c)	(d=a-b)	(e=f+g)	(f)	(g)	(h=b+g)	(i=d-e)	(j=b+e)
Obat	Targeted	1.562	1	14	-	49	1.547	1.114	1.075	39	54	433	1.129
Obat tradisional	Targeted	1.991	2	-	-	226	1.989	1.504	1.244	260	262	485	1.506
kuasi	Targeted	35	-	-	-	1	35	14	12	2	2	21	14
Suplemen Kesehatan	Targeted	538	-	-	-	35	538	400	344	56	56	138	400
Kosmetik	Targeted	4.639	2	-	-	892	4.637	2.888	2.120	768	770	1.749	2.890
Rokok	Targeted	183	-	-	-	14	183	30	30	-	-	153	30
Pangan	Targeted	2.522	-	-	2	251	2.520	1.867	1.626	241	243	653	1.869

Tabel 1. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Targeted)

Sampai dengan Triwulan II tahun 2022, dari 11.470 sampel *targeted* yang disampling terdapat 7.838 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana 1.387 (17,70%) sampel tidak memenuhi syarat.

B. Random

Komoditi	Metode Sampling	Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			TIE/Ilegal/Palsu	Kedaluarsa	rusak				MS	TMS*			
		(a)	(b)			(c)	(d=a-b)	(e=f+g)	(f)	(g)	(h=b+g)	(i=d-e)	(j=b+e)
Obat	Random	7.128	0	2	0	275	7.126	5.134	4978	156	158	1.992	5.136
Obat tradisional	Random	4.731	18	0	0	569	4.713	3.525	2.944	581	599	1.188	3.543
kuasi	Random	201	0	0	0	13	201	112	110	2	2	89	112
Suplemen Kesehatan	Random	1.349	0	0	0	109	1.349	944	812	132	132	405	944
Kosmetik	Random	9.401	34	0	0	2.043	9.367	6.466	4.681	1.785	1.819	2.901	6.500
Pangan	Random	8.576	3	3	0	1.173	8.570	5.952	5.206	746	752	2.618	5.958

Sumber: Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) BB/BPOM Triwulan II 2022

Tabel 2. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random)

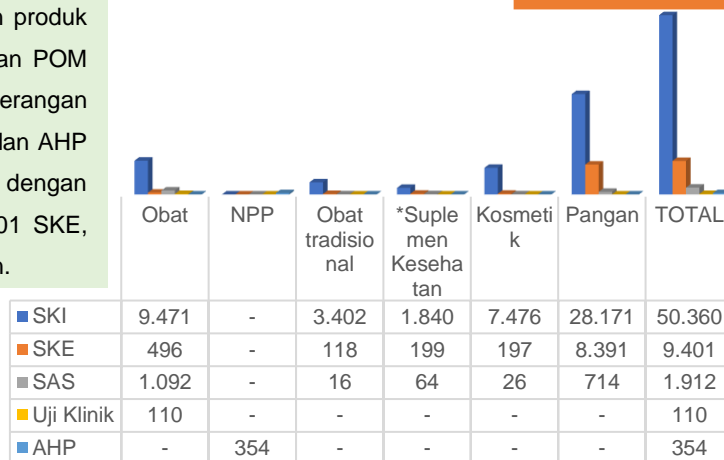
Keterangan:
MS = Memenuhi Syarat
TMS = Tidak Memenuhi Syarat
TIE = Tanpa izin Edar

Sampai dengan Triwulan II tahun 2022, dari 31.386 sampel *random* yang disampling terdapat 22.193 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana 3.462 (15,60%) sampel tidak memenuhi syarat.

Dalam rangka mendorong ekspor dan impor pengawasan produk dan bahan baku yang masuk ke wilayah Indonesia, Badan POM mengeluarkan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SAS (*Special Access Scheme*), Uji Klinik, dan AHP (Analisa Hasil Pengawasan) Obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan II tahun 2022 telah diterbitkan 50.360 SKI, 9.401 SKE, 1.912 SAS, 110 Uji Klinik, dan 354 AHP Obat dan Makanan.



Sertifikasi

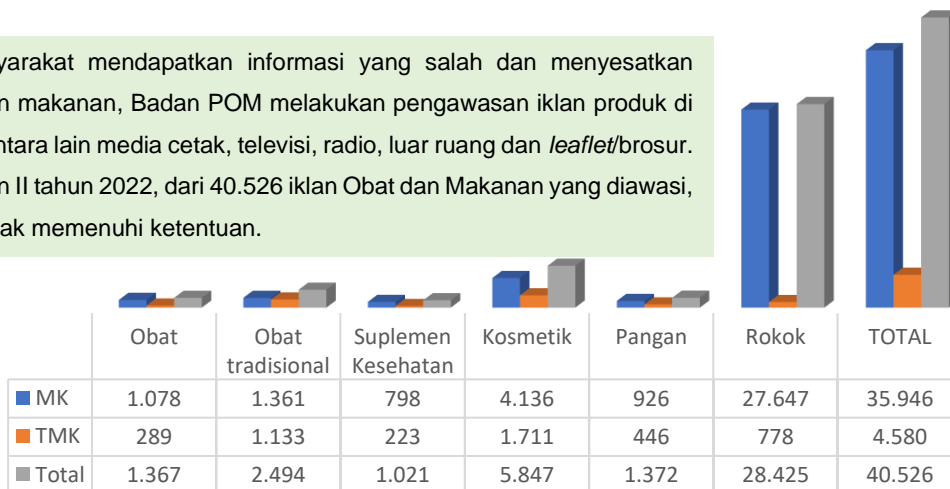


Keterangan: * Termasuk Kuasi

Gambar 5. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan

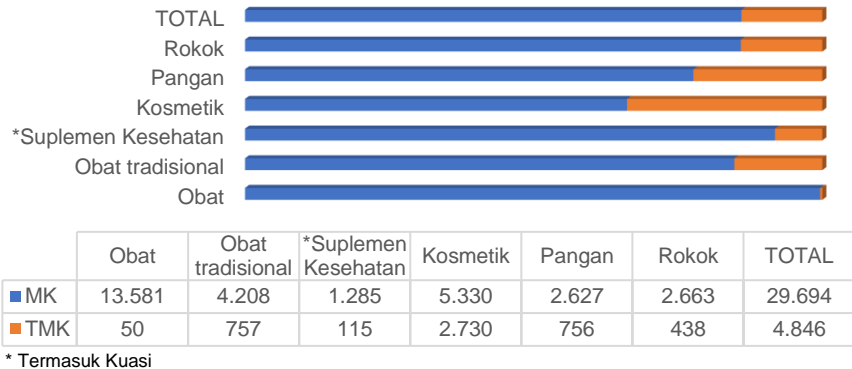
Pengawasan Iklan

Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk obat dan makanan, Badan POM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan *leaflet*/brosur. Sampai dengan Triwulan II tahun 2022, dari 40.526 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 4.580 (11,30%) iklan tidak memenuhi ketentuan.



Gambar 6. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan

Badan POM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan yang telah disetujui Badan POM, agar tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat. Sampai dengan Triwulan II tahun 2022, dari 34.540 label Obat dan Makanan yang diawasi, sebanyak 4.846 atau sekitar 14,03% label tidak memenuhi ketentuan.



Gambar 7. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan

Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan (MESSK), Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS)



	Jumlah Laporan	Jumlah laporan Tindaklanjuti	%
Obat	4.521	3.368	74,50
Obat Tradisional	13	13	100,00
Suplemen Kesehatan	14	14	100,00
Kosmetik	241	236	97,93

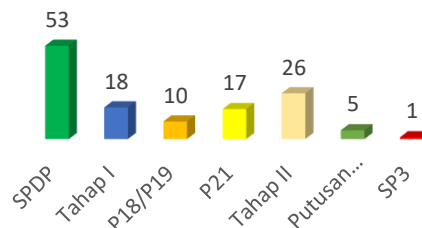
Tabel 3. Profil Laporan Efek Samping

Penggunaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, Badan POM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk Tim/Panitia:

- MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmakologi/farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya.
- MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.

II. Hasil Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

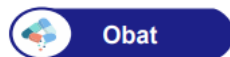
Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal termasuk palsu serta obat keras di sarana yang tidak berwenang, Badan POM secara terus menerus melakukan penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya (dalam kerangka Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal). Sampai dengan triwulan II tahun 2022, PPNS Badan POM telah menindaklanjuti 130 perkara. Sebanyak 53 perkara masih dalam tahap SPDP, 18 perkara pada tahap I, 10 perkara pada tahap P18/19, 17 perkara pada tahap P21, 26 perkara pada tahap II, 5 perkara sudah mendapatkan putusan pengadilan dan 1 perkara diterbitkan SP3.



Gambar 8. Grafik Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia (Januari – Juni 2022)

III. Penyusunan Standar/Regulasi/Pedoman

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun standar/regulasi/pedoman di bidang Obat dan Makanan.



Pada tahun 2022 terdapat 11 peraturan/standar/pedoman obat yang sedang dalam proses penyusunan. Daftar 11 peraturan/standar/pedoman obat beserta progres penyusunan selama triwulan II sebagai berikut:

1. Standar Obat Non Kompendial (66,67%).
2. Standar Mutu Produk Biologi dan Produk Radiofarmaka (100%).
3. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Pelulusan Bets/Lot Release Vaksin dan Produk Darah (28,57%).
4. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Risiko Keberadaan Nitrosamin dalam Obat dan Bahan Obat (57,14%).
5. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Penilaian Produk Inhaler dan Nasal (28,57%).
6. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Penilaian Spesifikasi Kemasan Obat (28,57%).

7. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Penetapan Informatarium Obat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Indonesia Edisi 4 (57,14%).
8. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Obat Generik Tertentu Wajib Uji Bioekivalensi (100%).
9. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pemasukan Obat dan Bahan Obat Melalui Jalur Khusus (*Special Access Scheme*) (100%).
10. Keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman Pengawasan Produk Tembakau (28,57%).
11. Keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman Teknis Pengawasan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Produksi, Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian (28,57%).



Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Terdapat 9 peraturan/standar/pedoman obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang sedang dalam proses penyusunan. Berikut 9 peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan selama triwulan II:

1. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Aspek CPOTB secara Bertahap (90%).
2. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Uji Farmakodinamik Pratinik Obat Tradisional (Lampiran) (40%).
3. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pengawasan Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (60%).
4. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 17 Tahun 2019 tentang Persyaratan Mutu Suplemen Kesehatan (60%).
5. Pedoman Uji Klinik Suplemen Kesehatan (80%).
6. Rancangan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (60%).
7. Rancangan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika (60%).
8. Rancangan Perubahan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk (60%).
9. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Parfum Isi Ulang (80%).

Target jumlah kajian obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 sebanyak 130 kajian. Pada triwulan II telah diselesaikan sebanyak 36 kajian dan seluruhnya diselesaikan tepat waktu. Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan dari *stakeholder*.



Pangan

Terdapat 10 peraturan/standar/pedoman pangan olahan yang sedang dalam proses penyusunan. Daftar 10 peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan selama triwulan II sebagai berikut:

1. Penyusunan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 (Lampiran III - V) (40%).
2. Penyusunan *Code of Practices* untuk mereduksi 3-monochloropropane-1,2- diol esters (3-MCPDE) dan glycidyl esters (GE) dalam Minyak Goreng Sawit (40%).
3. Penyusunan Pedoman Pengkajian Bahan Tambahan Pangan (50%).
4. Penyusunan Revisi Peraturan Badan POM No. 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan (50%).
5. Penyusunan Rancangan Perubahan Kedua Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (60%).
6. Penyusunan Pedoman Iklan Pangan Olahan (50%).
7. Penyusunan Revisi Peraturan Kepala Badan POM No. 9 Tahun 2016 tentang Acuan Label Gizi (28,57%).
8. Penyusunan Pedoman Implementasi Regulasi Pangan Berasam Rendah untuk UMKM (28,57%).
9. Penyusunan Revisi Peraturan BPOM No. 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Produk Rekayasa Genetik (Pangan Siap Saji Terkemas) (50%).
10. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Jenis Mikroorganisme yang Digunakan pada Pangan Olahan (30%).

Badan POM juga menyusun kajian terkait pangan olahan. Selama triwulan II telah diselesaikan 83 kajian dan seluruhnya diselesaikan tepat waktu. Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan dari *stakeholder*.

IV. Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan

Riset dan Kajian Obat dan Makanan dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan sekaligus dasar penyusunan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, selain itu data hasil riset dan kajian yang berupa informasi dan rekomendasi juga dimanfaatkan untuk mengetahui dan meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 11 topik riset dan kajian prioritas yang dilaksanakan BPOM pada tahun 2022 dengan progres triwulan II sebagai berikut:

1. Analisis Data Pengawasan Obat dan Makanan dalam Rangka Mendukung Pengendalian Resistensi Antimikroba di Lingkungan Badan POM Tahun 2022 (56%).

2. Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan Mendukung Usaha Mikro Kecil (UMK) Obat Tradisional menggunakan pemodelan *System Dynamic* (42%).
3. Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia *Risk Assessment Center* (INARAC) (77%).
4. Survei Profil Produk Obat dan Makanan Beredar (45%).
5. Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022 (50%).
6. Pengukuran Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2022 (65%).
7. Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan (65%).
8. Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan BPOM Tahun 2022 (60%).
9. Evaluasi Penerapan 2D *Barcode* dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan (70%).
10. Kajian Polutan Farmasi Pada Air Baku Untuk Minum dan Produksi Obat dan Makanan Tahun 2022 (35%).
11. Analisis Senyawa Karsinogenik pada Produk Pangan Olahan dan Kemasan Pangan (53%).

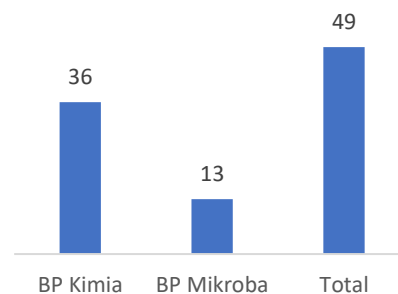
V. Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan

1. Metode Analisis (MA) yang dikembangkan

Badan POM terus mengembangkan metode analisis (MA) Obat dan Makanan agar dapat melakukan pengujian keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar. Pengembangan metode analisis (MA) dilakukan untuk komoditi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, produk biologi, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, air, mikrobiologi dan biologi molekuler. Pada tahun 2022, Badan POM menargetkan pengembangan 200 MA. Sampai dengan triwulan II, telah dikembangkan 74 judul MA.

2. Baku Pembanding yang dikembangkan

Pengembangan Baku Pembanding (BP) dapat dimanfaatkan oleh Balai Besar/ Balai POM untuk memperkuat pengawasan Obat dan Makanan melalui pengujian laboratorium. Pada triwulan II tahun 2022 telah dikembangkan 49 baku pembanding (BP) terdiri dari 36 BP kimia dan 13 BP mikrobiologi.



Gambar 9. Grafik Baku Pembanding yang dikembangkan (Januari – Juni 2022)

3. Sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu

Badan POM selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholder* melalui pelayanan pengujian Obat dan Makanan termasuk sampel pengujian produk biologi dan sampel *lot release* vaksin dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat, yaitu dengan pemenuhan *timeline* pengujian sampel Obat dan Makanan.

Sampai dengan triwulan II tahun 2022, terdapat 470 sampel yang diterima oleh laboratorium PPPOMN. Sebanyak 409 sampel telah selesai uji dan seluruhnya sesuai dengan ketentuan *timeline*.

4. Alat Pengujian Laboratorium Badan POM yang dikalibrasi sesuai Standar

Untuk menjamin validitas pengujian Obat dan Makanan di laboratorium diperlukan alat yang sudah terkalibrasi sesuai standar. Sampai dengan triwulan II tahun 2022, telah dilakukan kalibrasi terhadap 1.598 peralatan laboratorium.

5. Jejaring Pengujian Obat dan Makanan yang Berpartisipasi Aktif

Kegiatan jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas laboratorium uji, *sharing* informasi dan teknologi terkini yang sesuai dengan target dari jejaring tersebut. Kegiatan dapat berupa pertemuan, uji profisiensi, kolaborasi, pelatihan, *workshop*, FGD yang diikuti oleh laboratorium di lingkungan BPOM dan laboratorium non-BPOM sesuai lingkup pengujian/ keahlian.

Pada tahun 2022, Badan POM menargetkan partisipasi dalam 10 jejaring laboratorium. Sampai dengan triwulan II tahun 2022, Badan POM telah berpartisipasi dalam 2 jejaring yaitu Jejaring ASEAN *Pharmaceutical Testing Laboratory Committee* (APTLC) dan ASEAN *Cosmetic Testing Laboratory Committee* (ACTLC).

6. Pengujian Sampel Spesimen Covid-19

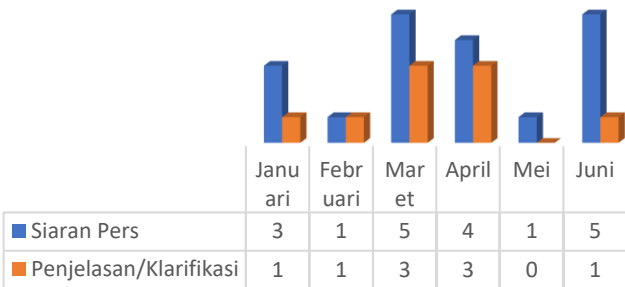
Di masa pandemi, Badan POM berkontribusi dalam pengujian sampel spesimen Covid-19 yang dilakukan di Laboratorium *Biohazard*. Sampai dengan triwulan II tahun 2022, jumlah spesimen Covid-19 yang diuji sebanyak 10.272 spesimen.

Pada tahun 2022, laboratorium *biohazard* Badan POM bergabung dalam jejaring pengujian *Whole Genome Sequencing* (WGS), di mana pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui penyebaran mutasi virus Covid-19. Dari 1.146 spesimen yang diuji WGS selama triwulan II, sebagian besar sampel merupakan varian Omicron.

VI. Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat

Sampai dengan triwulan II tahun 2022, Badan POM telah menerbitkan 19 siaran pers dan 9 penjelasan/klarifikasi Badan POM terkait isu Obat dan Makanan. Penerbitan siaran pers paling banyak terjadi di bulan Maret yaitu sebanyak 5 siaran pers, sedangkan penjelasan/klarifikasi paling banyak dipublikasikan di bulan Maret yaitu 3 klarifikasi.

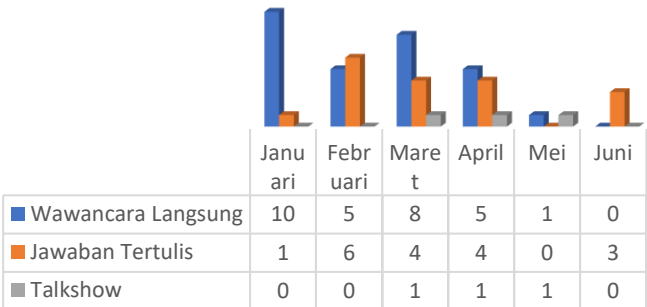
Pembahasan isu bervariasi dari berbagai komoditas, antara lain obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, dan umum/kinerja. Namun sepanjang triwulan II tahun 2022, topik yang paling sering dibahas dalam siaran pers dan penjelasan/klarifikasi berasal dari komoditas obat. Seluruh siaran pers dan penjelasan/klarifikasi



Gambar 10. Data Penerbitan Siaran Pers dan Penjelasan/Klarifikasi

berita dipublikasikan melalui *website* dan media sosial Badan POM.

Hingga triwulan II tahun 2022, Badan POM melakukan kegiatan pelayanan informasi kepada media berupa wawancara/*talkshow* serta pemberian jawaban tertulis. Dengan rincian kegiatan pelayanan informasi yang dilakukan adalah 29 wawancara langsung, 18 jawaban



Gambar 11. Realisasi Kegiatan Pelayanan Informasi kepada Media

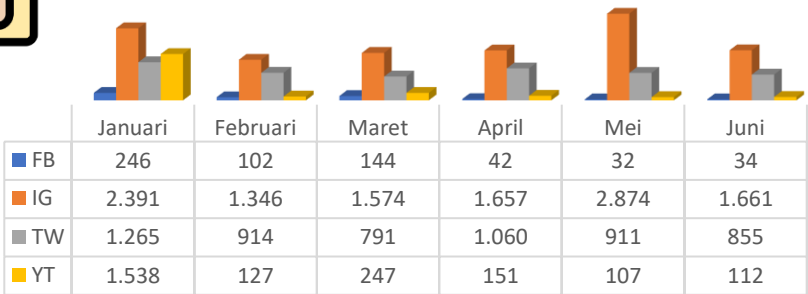
tertulis dan 3 *talkshow*.

Badan POM juga secara aktif menyampaikan informasi seputar kegiatan strategis yang dilakukan Badan POM melalui berita aktual yang diunggah melalui *website* resmi Badan POM dan disebarakan kepada media massa. Tercatat sudah 58 berita aktual telah dipublikasikan, yang merupakan hasil peliputan kegiatan Badan POM sampai dengan triwulan II tahun 2022. Adapun peliputan kegiatan Badan POM yang telah dilakukan adalah sebanyak 86 kegiatan, baik yang terselenggara di dalam kota maupun di luar kota. Sebagai informasi, tidak seluruh peliputan kegiatan Badan POM dijadikan berita aktual.

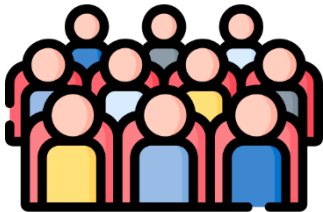
Pada triwulan II tahun 2022, aktivitas media sosial Badan POM pada 4 platform media sosial yaitu Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube memiliki rata-rata 2-3 unggahan per hari. Platform Twitter adalah platform yang memiliki aktivitas tertinggi sebanyak 493 tweets dibandingkan dengan 3 platform media sosial lainnya. Aktivitas tertinggi kedua adalah Instagram dengan 188 unggahan, menyusul Facebook sebanyak 155 unggahan, serta Youtube sebanyak 33 unggahan.

Secara garis besar, total unggahan periode Januari sampai dengan Juni 2022 di berbagai platform adalah 1.822 konten. Rincian jumlah unggahan per bulannya adalah 357 unggahan di bulan Januari, 224 unggahan di bulan Februari, 372 unggahan di bulan Maret, 357 unggahan di bulan April, 231 unggahan di bulan Mei dan 281 unggahan di bulan Juni.

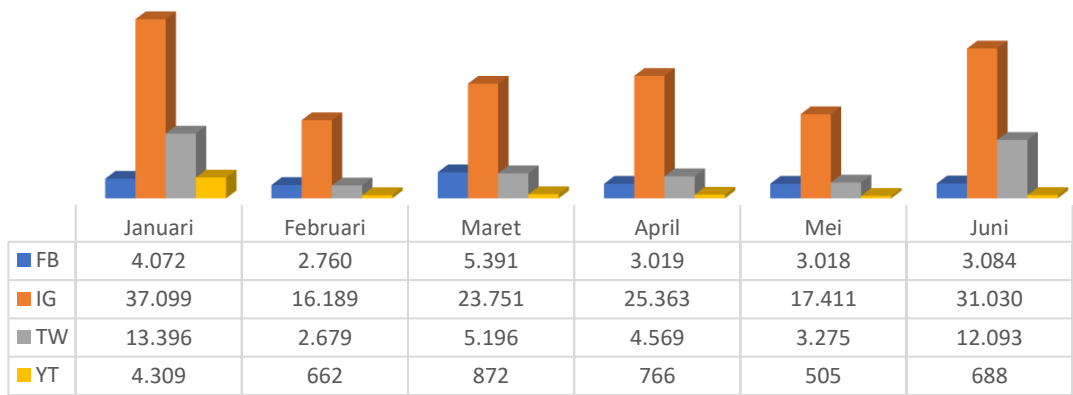
Sementara itu, pertumbuhan audiens/khalayak/pengunjung terhadap 4 platform media sosial terpantau stabil. Instagram merupakan platform dengan total audiens/khalayak/pengunjung tertinggi pada triwulan II dengan jumlah audiens/khalayak/pengunjung sebanyak 6.192 audiens, sementara di peringkat kedua ada platform Twitter dengan jumlah 2.826 audiens, dilanjutkan dengan Youtube dengan jumlah 370 audiens dan Facebook dengan 108 audiens. Pertumbuhan audiens tertinggi terjadi pada Mei, yaitu sebesar 3.924 audiens, disusul April 2.910 audiens dan Juni 2.662 audiens.



Gambar 12. Pertumbuhan Audiens per Platform pada Triwulan II 2022



Pada triwulan II, *engagement* pada setiap *platform* cenderung fluktuatif. *Engagement* tertinggi hanya terjadi pada *platform* Instagram pada bulan Juni dengan jumlah 31.030, diikuti bulan April sebesar 25.363, dan Mei sebesar 17.411. Pertumbuhan jumlah *engagement* terlihat fluktuatif di 4 *platform* tersebut. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada bulan Juni karena adanya konten perubahan penggolongan psikotropika, perubahan penggolongan narkotika, dan Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2022. Sedangkan rendahnya *engagement* pada bulan Mei terjadi kemungkinan karena kurangnya isu-isu yang menarik perhatian audiens pada bulan tersebut.



Gambar 13. *Engagement* Media Sosial
Badan POM



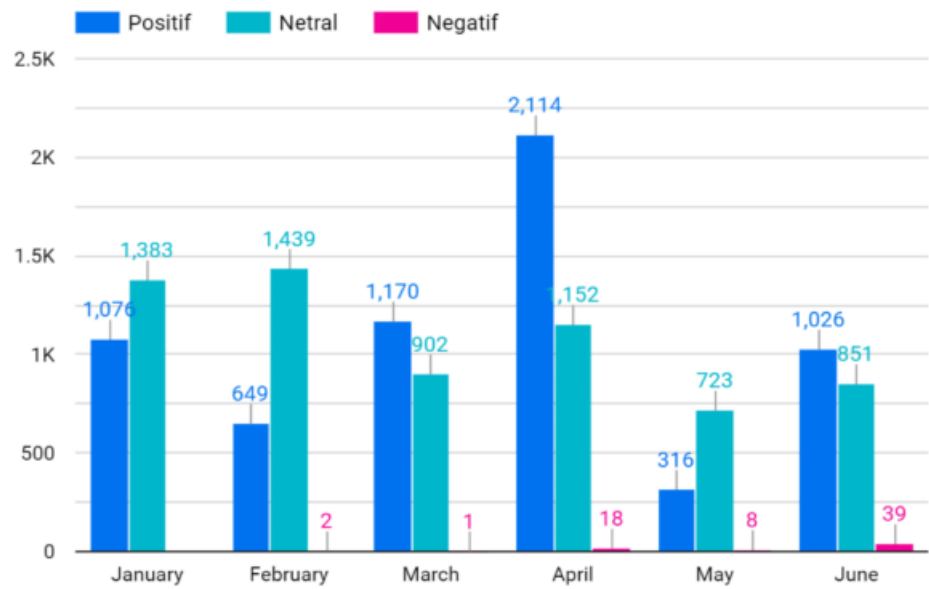
Top engagement content terkait Badan POM pada keempat platform dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 14. Top engagement content terkait Badan POM pada platform Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube pada triwulan II



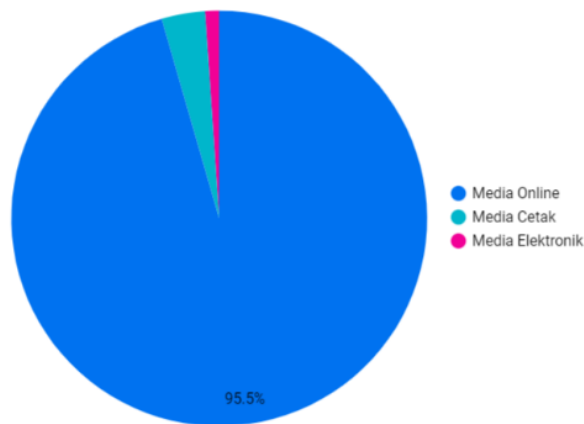
Pemberitaan terkait Obat dan Makanan dan Badan POM sampai dengan triwulan II terdiri dari 12.869 pemberitaan. Dari jumlah tersebut, berita bertonasi netral sebanyak 6.351 pemberitaan dan berita bertonasi positif sebanyak 6.450 pemberitaan serta berita bertonasi negatif sebanyak 68 pemberitaan. Tonasi berita positif muncul dari berbagai kegiatan Badan POM serta banyaknya pernyataan Badan POM dalam sebuah isu yang dikutip media, sedangkan tonasi netral muncul dari pemberitaan dengan topik obat dan makanan yang tidak mengutip Badan POM.



Gambar 15. Tren Tonasi Pemberitaan

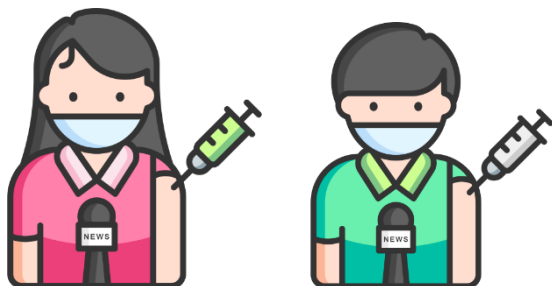
Jika dilihat pada grafik di atas, berita positif terbanyak terdapat pada April dan berita positif mendominasi pada Maret dan Juni. Sedangkan berita netral mendominasi pada Januari, Februari, dan Mei. Tingginya pemberitaan netral pada Januari dan Februari ini terkait dengan jumlah pemberitaan mengenai pelaksanaan vaksinasi yang tidak selalu berkaitan dengan Badan POM.

Berdasarkan jenis media, media yang memberitakan terkait Obat dan Makanan lebih banyak terdapat di media online (95,5%), sedangkan media cetak sebanyak 3,4% dan media elektronik 1,1%.



Gambar 16. Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media Sampai Dengan Triwulan II 2022

Tahun 2022 diawali dengan pemberitaan penerbitan EUA vaksin *booster* bagi 5 vaksin Covid-19 yaitu CoronaVac atau Vaksin COVID-19 Bio Farma, Comirnaty oleh Pfizer, AstraZeneca (Vaxzevria dan Kconecavac), Moderna, dan Zifivax. Kemudian pada bulan Februari Badan POM memberikan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK) untuk Vaksin Merah Putih. Selanjutnya pada bulan Maret, Badan POM mengangkat isu penemuan produk kopi dan jamu Berbahan Kimia Obat (BKO). Pada bulan April pemberitaan didominasi oleh topik mengenai intensifikasi pengawasan yang dilakukan selama bulan Ramadhan. Sedangkan isu mengenai pelabelan BPA *free* mendominasi pemberitaan pada Mei dan Juni.



Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan*

Triwulan II Tahun 2022



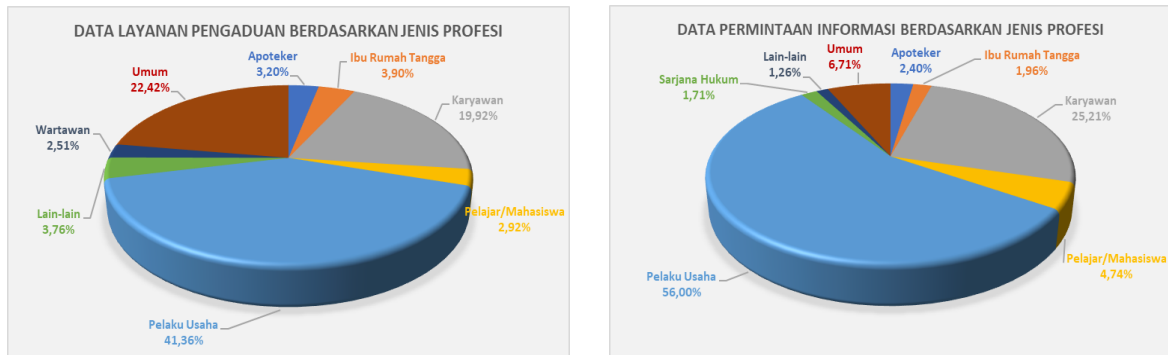
Gambar 17. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2022

Keterangan: *KIE oleh Biro Hukum dan Organisasi

Sampai dengan triwulan II tahun 2022, terdapat 38 permintaan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Topik permintaan informasi tersebut mengenai uji klinik dan keamanan vaksin Covid-19, EUA vaksin Covid-19, sertifikat izin edar/surat keterangan terdaftar obat tradisional, profil dan biodata pimpinan dan ASN Badan POM, peraturan tentang kategorisasi produk pangan olahan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), pengadaan barang dan jasa, rekapitulasi izin edar produk Obat dan Makanan, dan data obat palsu. Dari seluruh permintaan informasi tersebut, 24 (63,16%) permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya, 9 (23,68%) permintaan informasi yang dikabulkan sebagian, dan 5 (13,16%) permintaan informasi yang ditolak dengan alasan ada sebagian informasi yang termasuk dalam Informasi yang Dikecualikan dan Tidak Dikuasai (dikuasai oleh instansi lain). Seluruh permintaan informasi dapat diselesaikan sesuai jangka waktu penyelesaian (tidak lebih dari 17 hari kerja), dengan rata-rata waktu penyelesaian layanan permintaan informasi yaitu 9,34 hari kerja.

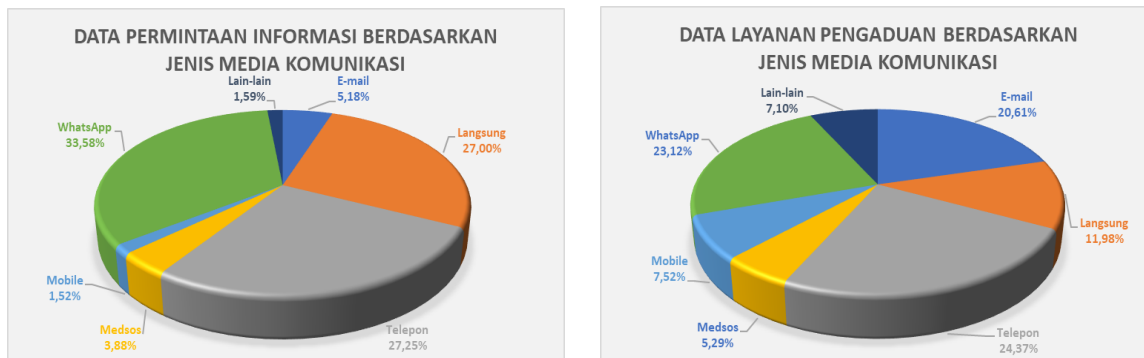
Berdasarkan data layanan informasi dan pengaduan masyarakat periode Januari-Juni tahun 2022, Badan POM telah melaksanakan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui ULPK Pusat dan 73 Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia serta *Contact Center* HALOBPOM 1500533 sebanyak 23.477 layanan, terdiri dari 22.759 (96,94%) layanan permintaan informasi dan 718 (3,06%) layanan pengaduan.

Profil profesi masyarakat yang mengakses layanan informasi sebagian besar berasal dari pelaku usaha sebanyak 12.746 (56,00%) layanan dan karyawan sebanyak 5.738 (25,21%) layanan. Adapun pengaduan sebagian besar dari pelaku usaha sebanyak 153 (38,83%) layanan dan masyarakat umum sebanyak 94 (23,86%) layanan.



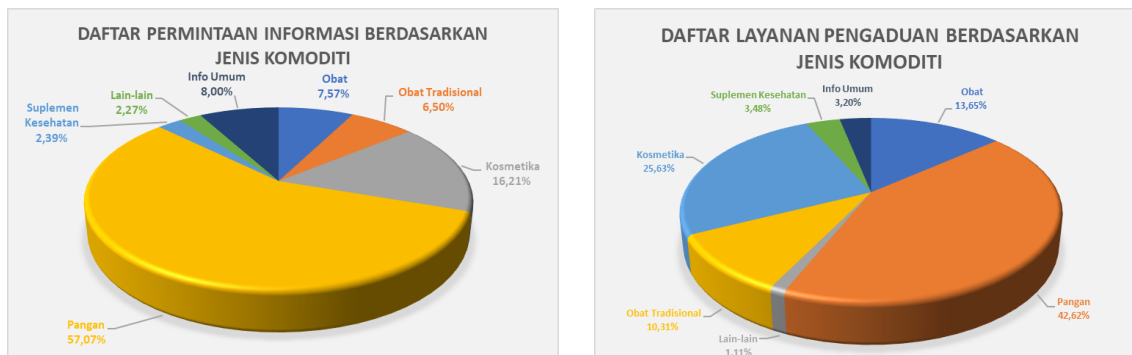
Gambar 18. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Profesi

Media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam mengakses layanan informasi yaitu melalui aplikasi *WhatsApp* sebanyak 7.643 (33,58%) layanan dan telepon sebanyak 6.202 (27,25%) layanan. Adapun media yang paling banyak digunakan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan yaitu melalui telepon sebanyak 175 (24,37%) dan aplikasi *WhatsApp* sebanyak 166 (23,12%) layanan.



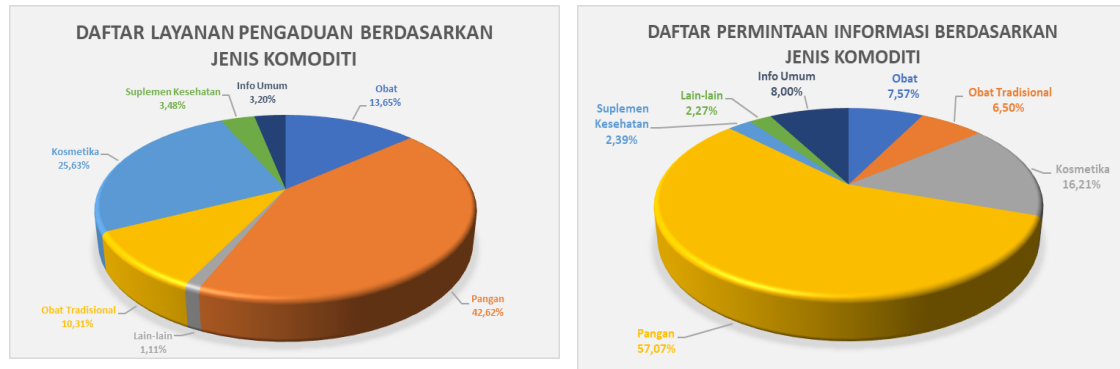
Gambar 19. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Jenis Media

Berdasarkan komoditi, informasi yang banyak ditanyakan masyarakat yaitu terkait pangan sebanyak 12.988 (57,07%) layanan dan kosmetik sebanyak 3.689 (16,21%) layanan. Adapun komoditi yang banyak diadukan yaitu pangan sebanyak 306 (42,62%) layanan dan kosmetik sebanyak 184 (25,63%) layanan.



Gambar 20. Profil Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan oleh Badan POM Berdasarkan Komoditi

Topik informasi yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat yaitu terkait proses pendaftaran sebanyak 6.933 (50,97%) layanan dan proses sertifikasi sebanyak 2.695 (19,81%%) layanan. Topik lain yang sering ditanyakan antara lain tentang penerimaan pegawai Badan POM, informasi magang/penelitian, informasi nomor kontak dan alamat unit di Badan POM, proses sertifikasi Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) dan Surat Keterangan Impor dan Ekspor (SKI/SKE), peraturan terkait pengawasan Obat dan Makanan, produk terdaftar, pengujian laboratorium, indikasi/khasiat, label halal, bahan tambahan pangan, dan tanggal kedaluwarsa. Adapun topik pengaduan yang banyak diajukan yaitu tentang inspeksi sebanyak 170 (43,15%) layanan dan keluhan terkait proses pendaftaran sebanyak 84 (21,32%) layanan.



Gambar 21. Topik Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan atau Ditanyakan kepada Badan POM

Topik informasi yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat yaitu terkait proses pendaftaran sebanyak 11.633 (51,11%) layanan dan proses sertifikasi sebanyak 4.273 (18,77%%) layanan. Topik lain yang sering ditanyakan antara lain informasi magang/penelitian, informasi nomor kontak dan alamat unit di Badan POM, proses sertifikasi Cara Pembuatan Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) dan Surat Keterangan Impor dan Ekspor (SKI/SKE), produk terdaftar, peraturan terkait pengawasan Obat dan Makanan, pengujian laboratorium, indikasi/khasiat, label halal, bahan tambahan pangan, dan tanggal kadaluarsa. Adapun topik pengaduan yang banyak diajukan yaitu tentang inspeksi seperti pengaduan terhadap produk Obat dan Makanan ilegal ataupun tidak sesuai ketentuan sebanyak 299 (41,64%) layanan dan keluhan terkait proses pendaftaran sebanyak 134 (18,66%) layanan.

VII. Digitalisasi Pelayanan Publik

1. Implementasi Tanda Tangan Elektronik

Badan POM yang bekerjasama dengan BSrE (Balai Sertifikasi Elektronik) telah mengimplementasikan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sejak 2018. TTE di Badan POM telah diimplementasikan terhadap 12 Aplikasi baik layanan publik (dokumen perizinan) dan layanan internal (tata naskah dinas BPOM).

Implementasi TTE saat ini telah dilakukan secara menyeluruh untuk seluruh Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama baik di Pusat maupun UPT. Pada saat ini dilakukan pengembangan implementasi kepada seluruh Pejabat Administrator, Koordinator dan Sub Koordinator di lingkungan unit kerja pusat. Dalam hal menerapkan TTE untuk seluruh level hingga Sub Koordinator akan menggunakan aplikasi tata persuratan (Aplikasi Srikandi).

2. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Digital (2D Barcode)

a. Percepatan Implementasi

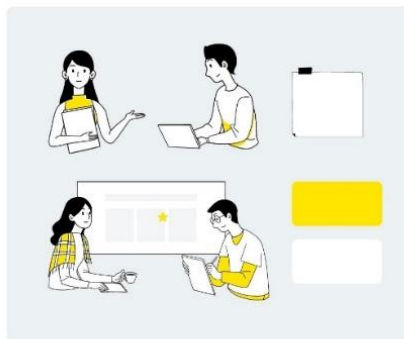


Pengawasan obat dan makanan berbasis digital merupakan salah satu cara dalam meminimalisir pemalsuan obat dan makanan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pendampingan kepada pelaku usaha serta sosialisasi kepada masyarakat.

Strategi pendampingan pelaku usaha yang dilakukan oleh Badan POM, antara lain dengan melakukan desk konsultasi baik secara tatap muka, maupun dengan helpdesk teknis dan substansi. Pelaksanaan desk konsultasi yang telah dilakukan pada Triwulan II terlampir pada gambar berikut.:

Desk Konsultasi 2D Barcode

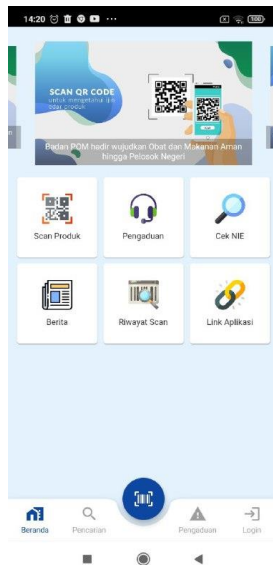
Desk Konsultasi dilakukan kepada 4 Pelaku Usaha
Helpdesk email dilakukan sebanyak 91 kali.



Gambar 22. Aktivitas dalam Percepatan Implementasi 2D Barcode

b. BPOM Mobile

Pencantuman 2D Barcode pada kemasan produk Obat dan Makanan memberikan kesempatan partisipatif seluas-luasnya bagi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Dengan melakukan pemindaian (scan) 2D barcode menggunakan aplikasi BPOM Mobile, masyarakat dapat memverifikasi keaslian dan legalitas produk. Aplikasi BPOM Mobile dilengkapi menu lainnya yaitu cek NIE produk, pengaduan dan update berita Klarifikasi BPOM. Masyarakat dengan mudah dapat melaporkan temuan produk ataupun pengaduan obat dan makanan dimanapun beradar tanpa harus mendatangi kantor Badan POM. Selain itu, BPOM Mobile wadah mencegah *hoax* dengan update berita ataupun klarifikasi seputar Obat dan Makanan.



Pada TW II, dilakukan pengembangan berupa menu LAPOR iklan yang ditujukan untuk mendukung pengawasan *post market* melalui pelaporan iklan pangan yang ditemukan, terutama iklan yang melanggar peraturan terkait label dan iklan pada pangan olahan. Aktivitas kebermanfaatan BPOM Mobile pada Triwulan II 2022 sebagai berikut:



Gambar 23. Aktivitas pada BPOM Mobile

3. Sistem Informasi Pelaporan Terpadu

Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai media pelaporan hasil pengawasan dari Balai Besar / Balai dan Loka POM ke Pusat secara elektronik sejak tahun 2012. Sistem ini mengalami pengembangan dan penyempurnaan setiap tahunnya mengikuti perkembangan pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM. Beberapa penyempurnaan yang telah dilakukan pada triwulan II tahun 2022 adalah:

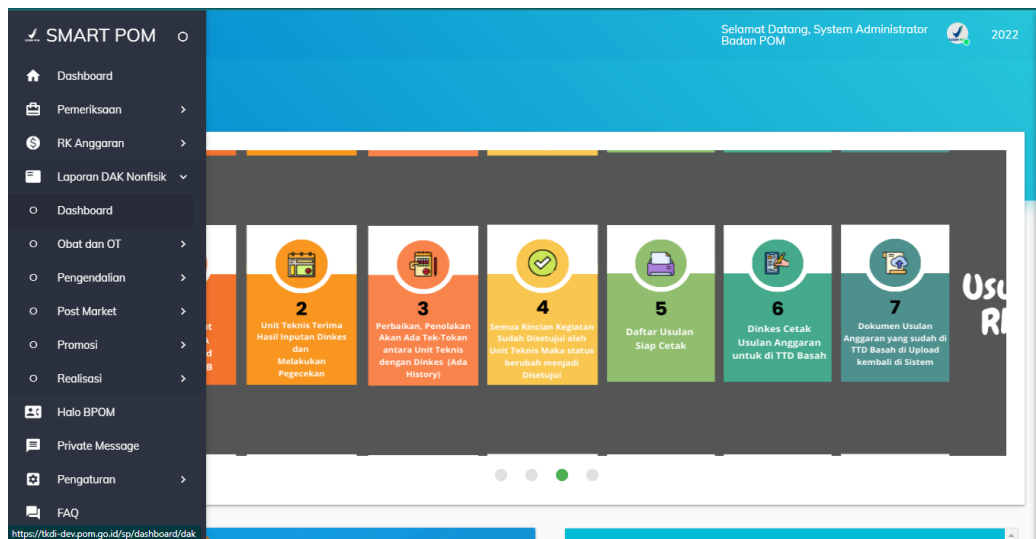
- 1) Migrasi data ke Pusat Data Nasional di Kementerian Komunikasi dan Informasi
- 2) Pengembangan alur regionalisasi
- 3) Perbaikan alur pihak ketiga
- 4) Penambahan fortifikasi dan penambahan kolom di Report Hasil Uji
- 5) Pengembangan monitoring dan evaluasi regionalisasi

4. Pengembangan SMART POM

Peningkatan kualitas pengawasan di daerah serta peningkatan peran Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pengawasan Obat dan Makanan atau yang disebut DAK Nonfisik POM, dalam kerangka DAK Nonfisik Bidang Kesehatan atau disebut Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Pengalokasian DAK Nonfisik yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kegiatan dan untuk melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengalokasian tersebut sesuai pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, aplikasi SMARTPOM ini dikembangkan dengan penyesuaian menu DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2022.

Dalam operasional aplikasi SMARTPOM, terdapat beberapa fitur tambahan yang telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Menu Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun Anggaran 2022. Pada triwulan II ini pengembangan aplikasi yang dilakukan berupa *redesign* dan penyempurnaan terkait fitur aplikasi SMARTPOM,

Tampilan aplikasi SMARTPOM sebagai berikut:



Gambar 24. Tampilan Antarmuka Aplikasi SMARTPOM

VIII. Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan II tahun 2022, telah ditetapkan 13 Peraturan Badan POM, 64 Keputusan Kepala Badan POM, dan 34 Rumusan Perjanjian. Selain itu Badan POM telah melakukan pembahasan 1 Rancangan Undang-Undang dan 3 Rancangan Peraturan Pemerintah. Bersama dengan Kementerian Kesehatan, Badan POM turut serta dalam pembahasan RPP tentang Revisi PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

1 Judul Rancangan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.



3 Judul Rancangan Peraturan Pemerintah

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan
2. Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan.

Judul Peraturan Badan POM

1. Peraturan Badan POM Nomor 1 tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan.
2. Peraturan Badan POM Nomor 2 tahun 2022 tentang Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi
3. Peraturan Badan POM Nomor 3 tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Klaim Kosmetika
4. Peraturan Badan POM Nomor 4 tahun 2022 tentang Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman
5. Peraturan Badan POM Nomor 5 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan POM
6. Peraturan Badan POM Nomor 6 tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan POM
7. Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Menu Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun Anggaran 2022
8. Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Di Lingkungan Badan POM
9. Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2022 tentang Persyaratan Cemaran Logam Berat Dalam Pangan Olahan
10. Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Uji Toksisitas Praklinik Secara In Vivo
11. Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Uji Bioekivalensi
12. Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2022 tentang Cara Pembuatan Obat Yang Baik di Rumah Sakit
13. Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan

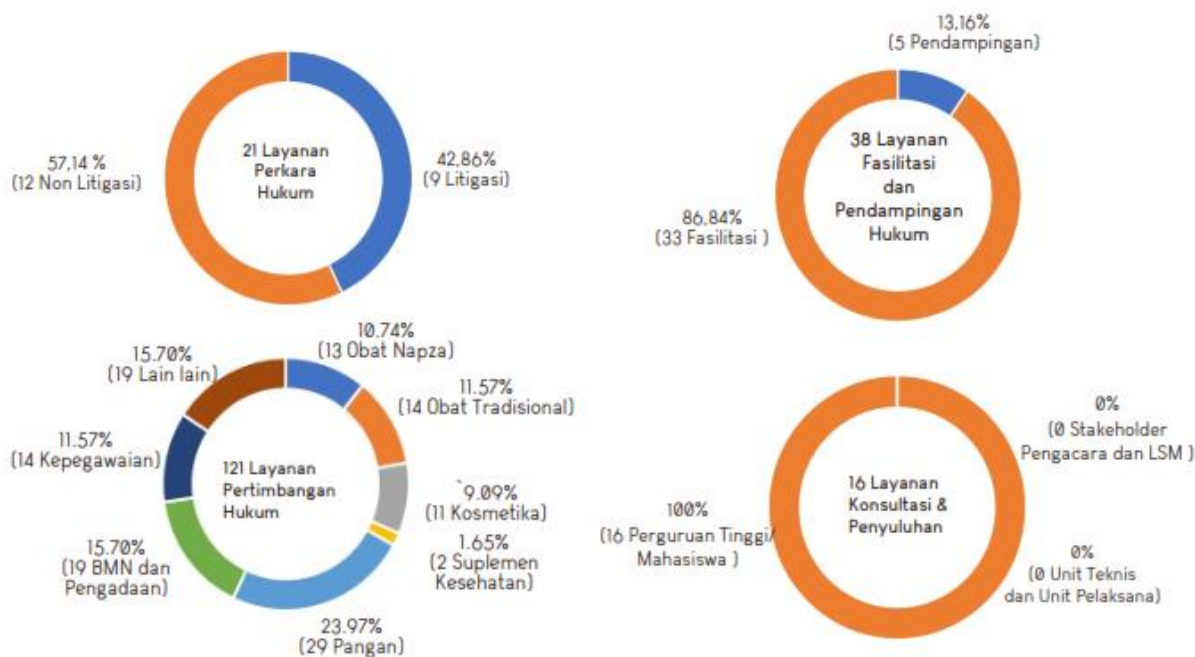
Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum)

Peran unit kerja yang membidangi hukum/legal pada setiap instansi pemerintah terkait pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan adalah sebagai unit kerja yang mendukung dalam aspek hukum, agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi.

Dukungan aspek hukum dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas Badan POM diberikan oleh Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum dan Organisasi berupa layanan advokasi hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Jumlah layanan advokasi hukum yang diberikan sejumlah 196 layanan yang terdiri dari:



IX. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan sebagai upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan baik di unit kerja Pusat maupun di UPT Badan POM. Sebagai bentuk perkuatan kelembagaan dan penataan organisasi dan tata kerja BPOM, telah disampaikan Surat Plt. Sekretaris Utama BPOM kepada Kementerian PANRB Nomor B-OT.01.02.2.22.03.22.183 tanggal 2 Maret 2022 hal Penyampaian Rancangan Peraturan BPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM. Di samping itu, penataan UPT BPOM dilakukan dengan mengusulkan perubahan kriteria klasifikasi UPT BPOM telah disampaikan kepada Kementerian PANRB dan dilakukan audiensi penataan kelembagaan UPT BPOM pada tanggal 21 Juni 2022.

BPOM perlu melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) yang bertujuan untuk menilai kemajuan dalam rangka pencapaian rencana aksi pelaksanaan RB BPOM tahun 2021 untuk mewujudkan sasaran RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Berdasarkan hasil evaluasi internal secara mandiri terhadap pelaksanaan RB BPOM yang selanjutnya dilakukan evaluasi secara eksternal atau diverifikasi oleh Kementerian PANRB, diperoleh hasil Indeks RB BPOM tahun 2021 adalah 84,68 dengan kategori A atau Sangat Baik, mengalami peningkatan dibandingkan 83,51 pada tahun 2020.

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020	2021
A.	Komponen Pengungkit			
	Pemenuhan	20,00	18,44	18,37
	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	7,49	7,91
	<i>Reform</i>	30,00	22,87	23,70
Total Komponen Pengungkit		60,00	48,80	49,98
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,50	8,53
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,10	8,98
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,50	8,93
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,61	8,26
Total Komponen Hasil		40,00	34,71	34,70
Indeks RB (Pengungkit + Hasil)		100,00	83,51	84,68

Tabel 4. Rincian hasil evaluasi RB

2. Tata Laksana

a. **Awareness QMS ISO 9001:2015 BPOM**

BPOM telah melakukan penyusunan Manual Organisasi yang merupakan integrasi antara ISO 9001:2015 dengan SNI ISO/IEC 17043:2010, ISO/IEC 17025:2017, ISO 17034:2016, ISO 45001:2018, serta telah disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja BPOM. Untuk penerapan manajemen risiko dilakukan integrasi antara ISO 9001:2015 dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Unit Kerja Pusat dan Balai Besar/Balai/Loka POM harus memastikan pegawai untuk mendapatkan *awareness* tentang kebijakan mutu, sasaran mutu yang relevan, efektivitas sistem manajemen mutu termasuk manfaat dari kinerja mutu, manajemen risiko serta dampak dari ketidaksesuaian penerapan dengan persyaratan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan persamaan persepsi untuk seluruh Manajer Representatif untuk seluruh Unit Kerja Pusat, Balai Besar/Balai dan Loka POM, dilaksanakan *awareness* QMS terhadap perwakilan dari Manajemen Representatif Unit Kerja Pusat pada 12 Mei 2022 di Bekasi. Terhadap perwakilan dari Manajemen Representatif UPT Balai Besar/Balai/Loka POM di Wilayah Indonesia Bagian Timur, *awareness* telah dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2022 di Balai Besar POM Makassar. Kegiatan *Awareness* QMS untuk perwakilan dari Manajemen Representatif UPT Balai Besar/Balai/Loka POM di Wilayah Indonesia Bagian Tengah diselenggarakan tanggal 30 Mei 2022 di Balai Besar POM Semarang. Kegiatan *Awareness* QMS yang dihadiri perwakilan dari Manajemen Representatif UPT Balai Besar/Balai/Loka POM di Wilayah Indonesia Bagian Barat berlangsung tanggal 3 Juni 2022 di Balai Besar POM Padang.

b. **Rapat Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 Unit Kerja di Lingkungan BPOM**

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BPOM menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (QMS) BPOM dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (QMS) BPOM.

Rapat Tinjauan Manajemen Unit Kerja dan UPT Balai Besar/Balai/Loka POM sesuai persyaratan ISO 9001:2015 klausul 9.3. *Management Review*, dilaksanakan berdasarkan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor OT.02.03.2.22.06.22.19 tentang Rapat Tinjauan Manajemen. Kegiatan dilakukan melalui tatap muka langsung dan atau secara daring pada Unit Kerja terkait.

c. Entry Meeting Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi

Penilaian mandiri mulai dilaksanakan pada Minggu ke-2 Juni sampai Minggu ke-4 Juni 2022 pada seluruh satuan kerja di lingkungan BPOM baik di Pusat maupun Balai Besar/Balai POM. Adapun tim SPIP terkait telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Plt. Sestama Nomor HK.02.02.2.22.05.22.41 Tahun 2022 tentang Tim Penilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan BPOM. Penerapan SPIP yang efektif akan mencegah berbagai bentuk penyimpangan atau kegagalan dalam upaya mencapai tujuan pengawasan Obat dan Makanan.

X. Kerjasama Internasional

Badan POM Dorong Ekspor Produk Obat dan Makanan Ke Persatuan Emirat Arab dan Kenya

Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Kenya merupakan *hub* di kawasanannya masing-masing yang merupakan salah satu tujuan ekspor sektor obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan yang cukup prospektif. Terlebih akses masyarakat Afrika atas obat yang masih sangat terbatas merupakan peluang bagi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk semakin giat melakukan penetrasi di pasar Afrika, salah satunya ke negara Kenya.

Dalam kaitan ini, Badan POM telah melaksanakan pertemuan dengan regulator mitra di negara PEA dan Kenya untuk membahas peninjauan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan serta menyelenggarakan *Business Forum* di Nairobi, Kenya. Selain kerja sama bidang obat dan makanan, Badan POM juga telah melaksanakan kunjungan ke Singapura guna menjajaki kolaborasi dalam pengembangan kapasitas regulatori obat dan obat tradisional. Kepala Badan POM telah bertemu dengan *Ministry of Climate Change and Environment* (MoCCA), PEA guna membahas strategi untuk pengembangan kebijakan



keamanan pangan yang ramah lingkungan. Selain itu, telah dilaksanakan kunjungan ke Distributor Pangan Indonesia di PEA untuk membahas kendala dan langkah – langkah strategi untuk mendorong industri pangan nasional untuk ekspor ke PEA dan negara Timur Tengah lainnya.



Di Kenya, Kepala Badan POM memenuhi undangan regulator obat Kenya yaitu *Pharmacy and Poisons Board* (PPB) Kenya untuk membahas peningkatan kapasitas regulator Kenya dan berbagi ilmu berupa pelatihan di bidang obat, obat tradisional, kosmetik. Sebelumnya, Kepala Badan POM telah bertemu dengan Kementerian Kesehatan Kenya untuk membahas pengembangan sistem regulatori obat dan vaksin yang baik di Kenya serta peningkatan

akses dan kesediaan obat dan vaksin di Kenya.

Bersama KBRI Nairobi, Badan POM telah menyelenggarakan *Business Forum* yang dihadiri pelaku usaha Indonesia dan Kenya untuk mendorong perdagangan antara kedua negara di bidang obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Sebagai tindak lanjut berbagai pertemuan dan kegiatan *Business Forum*, Badan POM akan mengawal kerja sama industri farmasi, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan Indonesia dan industri di Kenya, khususnya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan obat dan vaksin di Kenya. Badan POM juga akan mendampingi UMKM, industri pangan dan herbal Indonesia dalam melakukan *business matching* dengan pelaku usaha di PEA dan Kenya sebagai bagian upaya dukungan Indonesia's Spice Up the World dan peningkatan perdagangan di negara-negara tersebut.

XI. Sumber Daya Manusia

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pada triwulan II ini telah terlaksananya penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) STAN dan CPNS 2021 serta penempatan CPNS 2021. Selain itu telah dilakukan pendataan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang bertujuan untuk mengetahui PPNPS yang memenuhi persyaratan seleksi Calon Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (CPPPK).

2. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Aplikasi IDEAS (*Integrated Development and Training Information System*) merupakan *platform* pengembangan kompetensi digital terintegrasi di BPOM. Aplikasi IDEAS memiliki fitur *online shopping training* atau pelatihan tidak terjadwal yaitu fitur yang memfasilitasi pegawai untuk mengikuti pembelajaran secara *online* kapanpun dan di manapun dengan memanfaatkan modul materi di aplikasi IDEAS. Fitur lain yang dimiliki aplikasi IDEAS adalah webinar/diskusi *online* yang dapat diikuti oleh pegawai BPOM dengan narasumber yang berasal dari internal BPOM maupun eksternal. Keunggulan lain dari IDEAS berupa penerbitan sertifikat *online* di mana semua data pengembangan kompetensi pada IDEAS terintegrasi dengan <https://siasn.pom.go.id>.

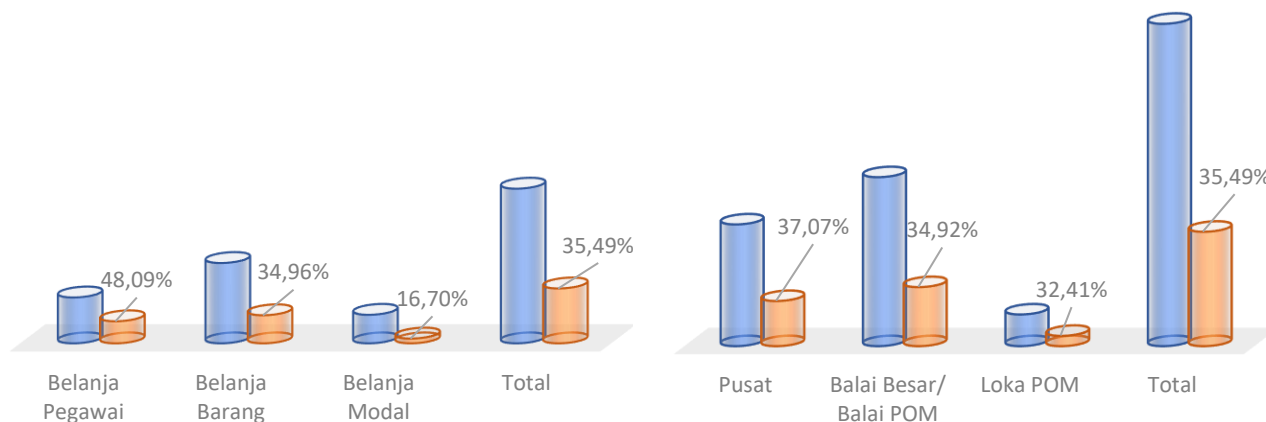
Sampai bulan Juni 2022, jumlah pegawai BPOM yang sudah memanfaatkan aplikasi IDEAS melalui menu *Online Shopping Training/Pelatihan Tidak Terjadwal* sebanyak 8.177 peserta, *Pelatihan Terjadwal* tidak ada peserta, *Webinar/diskusi online* sebanyak 1.060 peserta. Peserta yang lulus *Pelatihan Tidak Terjadwal* sebanyak 6.509 peserta, dan *Webinar/diskusi online* 930 peserta.

BPOM juga memiliki aplikasi SIMPHONI yang merupakan *platform knowledge management* di lingkungan BPOM. Aplikasi SIMPHONI memungkinkan pegawai atau Unit BPOM untuk *sharing* data, informasi, dan pengetahuan ke pegawai atau unit kerja lain.

Sampai dengan bulan Juni 2022, sebanyak 4.338 data/informasi/pengetahuan telah dikelola dalam aplikasi. Sebanyak 99 dari 103 unit kerja telah melakukan *sharing knowledge* melalui aplikasi SIMPHONI BPOM. Unit Kerja yang paling banyak mengunggah data/informasi/pengetahuan yaitu Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan dengan jumlah publikasi sebanyak 130.

XII. Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan II 2022

Total anggaran Badan POM Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.244.003.351.000,- untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Anggaran tersebut tersebar untuk 30 Satker Pusat, 34 Balai Besar/Balai POM dan 39 Loka POM. Realisasi anggaran Triwulan II tahun 2022 sebesar Rp796.350.229.546,- (35,49%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk Satker Pusat Rp314.141.691.071,- ,realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp410.797.658.585,- ,dan realisasi anggaran untuk Loka POM sebesar Rp71.410.879.890,-.



Gambar 25. Realisasi Anggaran s.d Triwulan II 2022

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
Pagu	665.244.673.000	1.165.238.282.000	413.520.396.000	2.244.003.351.000
Realisasi	319.924.558.558	407.382.242.105	69.043.428.883	796.350.229.546
	48,09%	34,96%	16,70%	35,49%

Unit Kerja	Pagu	Realisasi	%
Pusat	847.326.628.000	314.141.691.071	37,07%
Balai Besar/ Balai POM	1.176.312.577.000	410.797.658.585	34,92%
Loka POM	220.364.146.000	71.410.879.890	32,41%
Total	2.244.003.351.000	796.350.229.546	35,49%

XIII. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin telah melakukan pemantauan pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2022. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi anggaran serta realisasi pencapaian sasaran kegiatan dan pencapaian sasaran program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, juga kendala yang dihadapi untuk dapat segera diidentifikasi upaya tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan capaian RKP dilakukan per triwulan. Hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan Triwulan II tahun 2022 sebagaimana terlampir pada buku ini.

PENUTUP

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini hanya sebagian dari kinerja keseluruhan BPOM. Namun demikian para pihak terkait diharapkan mendapat gambaran jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama pembangunan pengawasan obat dan makanan 2021-2024 yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut BPOM akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, dengan mengutamakan niat baik, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang komprehensif (termasuk anggaran), pelaksanaan aksi, evaluasi dan analisis hasil, serta continuous Improvement.

LAMPIRAN 1

**CAPAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2022**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengawasan Obat	89	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	86	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	90	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengawasan Makanan	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	200	Kab/Kota	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	70	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
1.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	92,25	%	82,37	89,29%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	83	%	87,57	105,51%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	88,5	%	81,36	91,93%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	77,5	%	86,94	112,18%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	%	84,70	95,17%
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	81	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di	90	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		masingAkhir Tahunmasing wilayah kerja UPT BPOM				
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masingAkhir Tahunmasing wilayah kerja UPT BPOM	77	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di masingAkhir Tahunmasing wilayah kerja UPT BPOM	89,45	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di masingAkhir Tahunmasing wilayah kerja UPT BPOM	91	%	74,44	81,80%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di masingAkhir Tahunmasing wilayah kerja UPT	69	%	65,66	95,16%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masingAkhir Tahunmasing wilayah kerja UPT BPOM	91	%	94,60	103,96%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masingAkhir Tahunmasing wilayah kerja UPT BPOM	60	%	54,32	90,53%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing Akhir Tahunmasing wilayah kerja UPT BPOM	66	%	69,89	105,89%
		Indeks Pelayanan Publik di masingAkhir Tahunmasing wilayah kerja UPT BPOM	4,28	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	%	Progres 61,66%	
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di masingAkhir Tahunmasing wilayah kerja UPT BPOM	93	Nilai	93,36	100,39%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di masingAkhir Tahunmasing wilayah kerja UPT BPOM	2.010	Sekolah	Progres 43,85%	
		Jumlah desa pangan aman di masingAkhir Tahunmasing wilayah kerja UPT BPOM	648	Desa	Progres 44,91%	
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masingAkhir Tahunmasing wilayah kerja UPT BPOM	255	Pasar	Progres 56,24%	
		Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	%	49,68	49,68%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	%	49,20	49,20%
		Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	73	%	44,20	60,55%
		Indeks RB UPT	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP UPT	82	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN UPT	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium/GLP	81	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai Good Laboratory Practise	80	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	Indeks	2,14	95,11%
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,5	Nilai	69,69	74,53%
1.2	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	84	%	33,33	39,68

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas	80	%	100,00	125,00
		Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat	87,5	%	53,40	61,03
		Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif	92	%	0	0,00
		Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal	83,4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalisme ASN Direktorat Cegah Tangkal	84,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Cegah Tangkal yang optimal	2,25	Indeks	3	133,33
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal	90	Nilai	75	83,33
1.3	Intelijen Obat dan Makanan	Persentase rekomendasi intelijen obat dan makanan yang berkualitas	80	%	75,00	93,75%
		Persentase laporan informasi yang sesuai standar	80	%	91,81	114,76%
		Persentase laporan intelijen yang sesuai standar	80	%	66,67	83,34%
		Persentase Laporan informasi dan Laporan Intelijen UPT yang sesuai Pedoman	60	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	3	Jaringan	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	80,8	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	2,25	Indeks	2,50	111,11%
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	90	%	75,00	83,33%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.4	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	Persentase sarana Produksi Obat Tradisional yang memenuhi persyaratan CPOTB	83	%	92,91	111,94%
		Persentase iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	76	%	80,04	105,32%
		Persentase pemenuhan pedoman pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan oleh UPT	84	%	100,00	119,05%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	79	%	88,31	111,78%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	76	%	80,42	105,82%
		Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	94	%	100,00	106,38%
		Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	62	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	90	%	86,47	96,08%
		Indeks Pelayanan Publik dibidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	4,45	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	85,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	82,75	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang optimal	2,26	Indeks	3,00	132,74%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	99	%	75,00	75,76%
1.5	Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Persentase Industri pangan olahan yang menerapkan Manajemen Risiko	57	%	50,78	89,08%
		Persentase Peningkatan Industri pangan olahan yang telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)	13	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan produksi	58	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase pemenuhan pelaksanaan pengawasan produksi pangan olahan oleh UPT BPOM sesuai dengan NSPK	77	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	89	%	89,68	100,77%
		Persentase koordinasi Pengawasan Produksi Pangan fortifikasi yang dilaksanakan	80	%	36,00	45,00%
		Persentase tingkat pengetahuan pelaku usaha dan masyarakat terhadap Pengawasan Produksi yang diberikan	85	%	85,85	101,00%
		Jumlah kab/kota yang melaksanakan Pengawasan Produksi Pangan Olahan sesuai standar	200	Kab/Kota	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase keputusan penilaian sarana Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	89	%	100,00	112,36%
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang optimal	4,3	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang optimal	2,25	Indeks	2,50	111,11%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	91	%	75,00	82,42%
1.6	Pengawasan Kosmetik	Persentase sarana kosmetik yang memenuhi ketentuan	87	%	77,96	89,61%
		Persentase iklan kosmetik yang memenuhi ketentuan	87	%	77,34	88,90%
		Persentase pemenuhan Ketentuan pengawasan Kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	85	%	98,63	116,04%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	84.50	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	87	%	87,36	100,41%
		Persentase hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83	%	86,97	104,78%
		Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	90	%	97,93	108,81%
		Persentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	82	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	92	%	96,52	104,91%
		Indeks Pelayanan Publik dibidang pengawasan kosmetik	4.51	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan kosmetik	81	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan kosmetik	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan kosmetik yang optimal	2,25	Indeks	3,00	133,33%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan kosmetik	100	%	88,00	88,00%
1.7	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan pelayanan obat yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	77	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan stakeholder terhadap pelayanan publik distribusi obat	90	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	86	%	83,72	97,35%
		Persentase keputusan hasil pengawasan pengelolaan obat pemasukan jalur khusus yang diselesaikan	86	%	86,67	100,78%
		Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dana pelayanan obat oleh Balai	80	%	75,21	94,01%
		Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan tepat waktu	86	%	96,83	112,59%
		Indeks pelayanan publik Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	4,2	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase stakeholder yang mendapat regulatory assistance di bidang distribusi dan pelayanan obat	75	%	32,75	43,67%
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	93	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	80	Indeks	70,15	87,69%
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Pengawasan Distribusi dan pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang optimal	2,26	Indeks	2,25	99,56%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	88	%	85,36	97,00%
1.8	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepatuhan pelaku usaha dalam mutu dan keamanan obat dan NPP	94	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepatuhan industri Produk Tembakau dalam iklan dan label	48	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	18100	%	9653	53,33%
		Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	74	Permohonan	76,00	102,70%
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	4,51	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	92,59	%	93,00	100,44%
		Persentase laporan Farmakovigilans yang ditindaklanjuti	70	%	74,50	106,43%
		Persentase laporan pengawasan mutu, label dan iklan obat dan NPP yang ditindaklanjuti	87	%	30,77	35,37%
		Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	60400	Label dan Iklan	30310	50,18%
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	88,4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	79	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal	2,25	Indeks	3,00	133,33%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	98	%	100,00	102,04%
1.9	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Persentase Instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan olahan	75	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pengawasan sesuai standar	69	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah sarana peredaran yang menerapkan SMKPO Peredaran	350	sarana	310	88,57%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	85	indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan post market sesuai standar	200	Kab/Kota	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan peredaran pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	94	%	93,43	99,39%
		Persentase pelaku usaha dan masyarakat yang meningkat pengetahuannya terhadap implementasi peraturan peredaran pangan olahan yang baik	82	%	71,99	87,79%
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,51	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah Surat Keterangan Ekspor/Impor Pangan yang diselesaikan tepat waktu	67000	Permohonan	33876	50,56%
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	85,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang optimal	2,25	Indeks	3,00	133,33%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang baik	93	%	95,00	102,15%
1.10	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase sarana produksi obat yang mandiri dalam pemenuhan CPOB	60	%	94,44	157,40%
		Persentase fasilitas produksi produk JKN, produk highrisk lainnya, serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	90	%	30,92	34,36%
		Persentase tindak lanjut yang berkualitas dari hasil pengawasan sarana produksi di Balai	95	%	44,44	46,78%
		Persentase hasil pengawasan sarana produksi yang ditindaklanjuti	76	%	71,43	93,99%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	88	%	90,40	102,73%
		Persentase sarana produksi obat JKN, Bahan Baku Obat, dan obat highrisk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB	76	%	61,11	80,41%
		Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi Bahan Baku Obat, obat, produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	75	%	73,13	97,51%
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4,01	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat inovasi atau obat pengembangan baru	70	%	50,00	71,43%
		Nilai RB Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	93	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	80	Indeks	80,59	100,74%
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP yang optimal	2,26	Indeks	3,00	132,74%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	95	%	100,00	105,26%
1.11	Registrasi Pangan Olahan	Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	90	%	75,14	83,49%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase hasil penilaian registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95	%	95,55	100,58%
		Persentase pengaduan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	%	100,00	100,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4.65	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	Indeks	67,97	75,52%
		Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif	94	%	91,18	97,00%
		Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan	98,2	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan	80	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	2,26	Indeks	2,50	110,62%
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	98	%	78,00	79,59%
1.12	Registrasi Obat	Persentase obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	89	%	69,79	78,42%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang registrasi Obat	86	Indeks	87,35	101,57%
		Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	76	%	59,94	78,87%
		Persentase hasil penilaian registrasi obat yang diselesaikan tepat waktu	76	%	79,23	104,25%
		Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Obat yang ditindaklanjuti	100	%	100,00	100,00%
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat	4.20	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase sarana UK/Lab BE yang diinspeksi dan memenuhi CUKB	84	%	50,00	59,52%
		Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar di lingkup registrasi obat	100	%	100,00	100,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks RB Direkotrat Registrasi Obat	88.1	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat	88.9	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Obat yang optimal	2,25	Indeks	2,00	88,89%
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat	94	%	95,00	101,06%
1.13	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	93,5	%	88,65	94,81%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praktek/Klinik dan DIP	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praktek/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	82,5	%	93,38	113,19%
		Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praktek/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	74	%	78,72	106,38%
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4,45	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	82,5	%	87,06	105,53%
		Persentase pendampingan di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praktek/Klinik dan DIP yang efektif	77	%	91,67	119,05%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	85	%	85,95	101,12%
		Indeks RB Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik	87,2	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik	86,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik yang baik	2,25	%	2,50	111,11%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik	97	%	84,00	86,60%
1.14	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	89	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang disusun sesuai tahapan penyusunan	95,5	%	66,00	69,11%
		Persentase sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik kepada stakeholder yang efektif	91	%	91,60	100,66%
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	95,25	%	100,00	104,99%
		Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86,3	Indeks	94,00	108,92%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	2,75	Indeks	3,00	109,09%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100	%	95,00	95,00%
1.15	Standardisasi Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	93	%	42,71	45,92%
		Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada stakeholder yang efektif	90	%	90,29	100,32%
		Persentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar	84	%	73,00	86,90%
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	90	%	100,00	111,11%
		Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	4,45	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks reformasi birokrasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	88,4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	86,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	2,25	Indeks	2,75	122,22%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100	%	78,00	78,00%
1.16	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kualitas kebijakan pengawasan obat	89,7	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase sosialisasi standar ONPPZA kepada stakeholders yang efektif	89	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase standar ONAPPZA yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	89	%	54,61	61,36%
		Indeks RB Direktorat Standardisasi ONPPZA	87,3	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi ONPPZA	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi ONPPZA yang optimal	2,25	Indeks	2,25	100,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi ONPPZA	100	%	90,00	90,00%
1.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Persentase PKP/fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan sesuai Pedoman	70	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	87.5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	35	%	30,00	85,71%
		Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	240	Kab/Kota	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	95	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah PKP/fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	240	UMK	162	67,50%
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	3.81	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan pangan	322	Pemda	193	59,94%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Jumlah kader/fasilitator yang memahami prinsip keamanan pangan	500	Kader/fasilitator	237	47,40%
		Tingkat efektivitas KIE Makanan	93.56	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan sesuai Pedoman	85	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Dit PMPUPO	93	Indeks	91,54	98,43%
		Indeks Profesionalitas ASN Dit. PMPUPO	80	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Dit. PMPUPO yang optimal	2,26	Indeks	3,00	132,74%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. PMPUPO	92	%	75,00	81,52%
1.18	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian	81	%	77,28	95,41%
		Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium BPOM	20	%	7,00	35,00%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN	91	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	80	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	82,6	%	77,95	94,37%
		Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan	81,5	%	76,53	93,90%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar	100	%	50,63	50,63%
		Persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu	93	%	98,05	105,43%
		Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,21	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	71	%	57,00	80,28%
		Indeks RB PPPOMN	87.6	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP PPPOMN	78.7	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	86.25	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Status akreditasi	71	nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	2,25	Indeks	2,75	122,22%
		Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	94,1	nilai	76,38	81,17%
1.19	Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan	68	%	10,71	15,75%
		Persentase Pemenuhan Nilai Kinerja Penyidikan oleh UPT Badan POM	82	%	39,55	48,23%
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan yang ditindaklanjuti	80	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase perkara yang meningkat tahapan penyelesaiannya dengan adanya dukungan teknis	49	%	10,00	20,41%
		Persentase pendalaman informasi penyidikan yang berhasil menjadi Laporan Kejadian (LK)	60	%	50,00	83,33%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase barang bukti yang selesai ditangani sesuai standar	60	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	63,8	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang optimal	2,26	Indeks	2,00	88,50%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	90	%	88,00	97,78%
1.20	Riset dan kajian di bidang obat dan makanan	Persentase riset dan kajian pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan	78	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase riset dan kajian yang sesuai dengan perencanaan	100	%	90,91	90,91%
		Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset dan kajian	94	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai kualitas diseminasi hasil riset dan kajian	80	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	85,2	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	78,1	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	86,7	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang optimal	2,25	Indeks	2,75	122,22%
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	91,3	nilai	52,05	57,01%
1.21	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	81	Indeks	91,01	112,36%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase Pemda yang menerapkan program keamanan OT, SK, dan Kosmetik	50	%	41,67	83,34%
		Persentase Duta yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat	84	%	47,81	56,92%
		Persentase pemda yang diintervensi dalam rangka pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, Kos dan SK	76	%	80,00	105,26%
		Persentase pemda yang diintervensi dalam pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan OT, SK, dan Kos	50	%	37,50	75,00%
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan masyarakat (mulai tahun 2022)	60	%	58,90	98,17%
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan pelaku usaha (mulai tahun 2022)	60	%	67,12	111,87%
		Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku usaha UMKM OT yang sesuai standard (mulai th 2022)	95	%	21,92	23,07%
		Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku usaha UMKM Kosmetik yang sesuai standard (mulai th 2022)	95	%	51,52	54,23%
		Tingkat efektivitas KIE OT, Kos dan SK	94,19	%	94,68	100,52%
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, Kos dan SK	4,01	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah komunitas masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos	274	komunitas	131,00	47,81%
		Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	81	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang optimal	2,1	Indeks	3,00	142,86%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	99	%	75,00	75,76%
1.22	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	Persentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	83	%	82,83	99,80%
		Persentase Hasil Patroli Siber yang ditindaklanjuti	78	%	65,96	84,56%
		Persentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	83	%	90,85	109,46%
		Persentase Hasil Analisis Digital Forensik yang dimanfaatkan	88	%	91,68	104,18%
		Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan	76	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Direktorat Siber Obat dan Makanan	86,7	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal	2,25	Indeks	1,25	55,56%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	89	%	75,00	84,27%
2	Program Dukungan Manajemen	Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	33,21	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	Opini	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama	73,33	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93,5	Nilai	86,06	92,04
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Kepuasan Media	74,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Opini Publik BPOM	79	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kerja sama yang efektif	86	%	42,96	49,95
		Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,02	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi Internal Akutabilitas Kinerja BPOM	8,66	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	0,99	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
2.1	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatanAkhir Tahun selatan (KSST)	2	Negara	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	83	%	80,26	96,70%
		Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas	78,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Kerja Sama dan Humas	2,25	Indeks	2,50	111,11%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	90	%	92,00	102,22%
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,84	Negara	99,47	99,63%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase peran Badan POM dalam pertemuan Bilateral, Regional dan Multilateral	86	%	43,90	51,05%
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	66	%	80,65	122,20%
		Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting	95	%	98,68	103,87%
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86	%	42,01	48,85%
		Indeks kepuasan media	74,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks opini publik BPOM	79	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas dan Humas	3,85	Indeks	3,83	99,48%
2.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4,48	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	73,33	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	95	Nilai	78,38	82,51%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	95,22	Nilai	81,89	86,00%
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun dengan SAP	100	%	50,00	50,00%
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	3,82	Indeks	3,48	91,10%
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman	71,04	%	37,14	52,28%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	%	46,64	46,64%
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SETTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	%	32,29	32,29%
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan	83,5	%	89,58	107,28%
		Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	74,7	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Perencanaan dan Keuangan yang baik	2,25	Indeks	2,50	111,11%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100	%	95,00	95,00%
2.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	4,5	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	7,41	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai RB BPOM penataan tata laksana	5,47	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,76	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Hukum dan Organisasi	3,75	Indeks	3,75	100,00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100	%	58,37	58,37%
		Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	100	%	100,00	100,00%
		Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti	99,4	%	99,44	100,04%
		Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan	94,37	%	94,44	100,07%
		Indeks Pelayanan Publik	4,55	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	86,25	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	2,25	Indeks	3,00	133,33%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	95,5	%	85,00	89,01%
2.4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	5,59	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Sistem Merit	Level 4 (0,89)	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro SDM	3,44	Indeks	3,55	103,20%
		Persentase ASN BPOM Yang Ditingkatkan Kariernya Sesuai Pedoman Pola Karir	75	Indeks	59,55	79,40%
		Persentase ASN BPOM yang Memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik	92	%	99,86	108,54%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Kesejahteraan Pegawai	3,06	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Unit Kerja yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang Baik	72	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase layanan kepegawaian berbasis digital yang diimplementasikan sesuai perencanaan	80	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Biro SDM	83,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM	79	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro SDM	2,25	Indeks	2,25	100,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	100	%	78,00	78,00%
2.5	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi.	79	%	81,44	103,09%
		Jumlah SDM pengawas obat dan makanan yang tersertifikasi sesuai Standar	875	SDM	495	56,57%
		Nilai RB Badan POM Manajemen Perubahan.	4,66	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase SDM BPOM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSPDM POM	60	%	26,40	44,00%
		Persentase kerjasama pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti	82	Kerja Sama	53,00	64,63%
		Nilai Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	4,45	Nilai	4,58	102,92%
		Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	92	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu	50	%	29,00	58,00%
		Nilai kepuasan Layanan PFM	4	Nilai	4,53	113,25%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM terkait Manajemen Perubahan	88	Nilai	39,00	44,32%
		Indeks RB PPSDM POM	85	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP PPSDM POM	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	84	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSDM POM yang optimal.	2,26	Indeks	3,00	132,74%
		Nilai kinerja anggaran PPSDM POM	93,5	Nilai	75,96	81,24%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPSDM POM	94	%	75,00	79,79%
2.6	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	3,1	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Layanan TIK	3,4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	95	%	97,75	102,89%
		Persentase Pemenuhan Business Continuity Management	31	%	32,70	105,48%
		Indeks CSIRT (Computer Security Indeks Respon Time)	3,6	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan	80	%	49,70	62,13%
		Jumlah Data Berbagi Pakai	15	%	46,67	311,13%
		Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100	%	52,17	52,17%
		Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	70	Nilai	55,75	79,64%
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100	%	51,72	51,72%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	80,2	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	84,4	nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	78	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal	3	Indeks	3,00	100,00%
		Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan	50	%	28,01	56,02%
		Sertifikasi ISO 27001	1	sertifikat	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	93,6	Nilai	56,12	59,96%
2.7	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan	6,2	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja lingkup BPOM	8,66	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi mitra kerja Inspektorat I	3	Level	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi mitra kerja Inspektorat I	0,99	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93	%	94,44	101,55%
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat I	85,7	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang sesuai standar mutu	100	%	100,00	100,00%
		Nilai peer review terhadap pengawasan intern	75	Nilai	75,00	100,00%
		Persentase rekomendasi Pengawasan intern Inspektorat I yang ditindaklanjuti	94	%	96,28	102,43%
		Persentase pengaduan lingkup Inspektorat I yang ditindaklanjuti dengan tuntas	100	%	75,00	75,00%
		Persentase permintaan layanan konsultasi mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu	93	Level	98,56	105,98%
		Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat I	100	%	88,12	88,12%
		Persentase rekomendasi survei kepuasan masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	85	%	63,52	74,73%
		Indeks RB Inspektorat I	78	Indeks	84,42	108,23%
		Level kapabilitas APIP	4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I	87,15	Indeks	70,38	80,76%
		Indeks pengelolaan data dan informasi inspektorat I yang baik	2,25	Indeks	3,00	133,33%
2.8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat I	90	%	75,00	83,33%
		Nilai RB BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	6,02	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66	Nilai	8,47	97,81%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi mitra kerja Inspektorat II	4	Level	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup mitra kerja Inspektorat II	0,99	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat II	85,7	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	100	Nilai	100,00	100,00%
		Nilai peer review terhadap pengawasan intern Inspektorat II	75	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti	94	%	92,97	98,90%
		Persentase pengaduan lingkup Inspektorat II yang ditindaklanjuti dengan tuntas	100	%	66,67	66,67%
		Persentase permintaan layanan konsultasi mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	93	%	95,12	102,28%
		Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB BPOM yang ditindaklanjuti	100	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi hasil reuiu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat II	100	Level	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Inspektorat II	85,1	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Level Kapabilitas APIP	4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	86	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	2,25		3,00	133,33%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	90	%	75,00	83,33%
2.9	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	91	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Aset BPOM	2.93	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa BPOM	72	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum	3.75	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Perencanaan	100	Persen	54,76	54,76%
		Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan	88	Persen	84,23	95,72%
		Persentase Satker yang mampu Mengelola BMN dengan Baik	50	Persen	84,48	168,96%
		Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa oleh Satker	85	Level	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keberhasilan koordinasi dalam layanan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan	86	Persen	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Biro Umum	83.2	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Biro Umum	75	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum yang optimal	2,25	Indeks	2,00	88,89%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	90	%	75,00	83,33%

LAMPIRAN 2

**SERAPAN ANGGARAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN 2022
SUMBER: APLIKASI OMSPAN
(PER 30 JUNI 2022)**

A. UNIT PUSAT

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
1	SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	398.971.988.000	158.178.988.972	39,65%
1.1	BIRO KERJASAMA	15.608.438.000	4.417.762.559	28,30%
1.2	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	22.298.642.000	7.579.178.011	33,99%
1.3	BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	14.408.276.000	5.711.422.890	39,64%
1.4	BIRO UMUM	165.256.790.000	57.056.154.110	34,53%
1.5	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	181.399.842.000	83.433.152.440	45,99%
2	DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	52.328.994.000	18.631.947.503	35,61%
2.1	DIT. PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	8.153.558.000	3.052.988.914	37,44%
2.2	DIT. PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	11.740.547.000	3.287.484.123	28,00%
2.3	DIT. PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	11.306.322.000	4.613.158.154	40,80%
2.4	DIT. REGISTRASI OBAT	11.610.084.000	4.483.294.598	38,62%
2.5	DIT. STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	9.518.483.000	3.195.021.714	33,57%
3	DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	50.004.587.000	20.582.049.342	41,16%
3.1	DIT. PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	11.274.111.000	5.052.775.512	44,82%

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
3.2	DIT. PENGAWASAN KOSMETIK	9.287.950.000	2.836.031.835	30,53%
3.3	DIT. REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	10.400.772.000	4.181.165.628	40,20%
3.4	DIT. STANDADISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	6.798.182.000	3.377.039.993	49,68%
3.5	DIT. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	12.243.572.000	5.135.036.374	41,94%
4	DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	58.694.540.000	20.263.682.751	34,52%
4.1	DIT. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN	14.850.000.000	5.107.503.969	34,39%
4.2	DIT. PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN	12.834.540.000	4.260.933.088	33,20%
4.3	DIT. REGISTRASI PANGAN OLAHAN	8.568.000.000	3.377.787.762	39,42%
4.4	DIT. STANDRDISASI PANGAN OLAHAN	8.442.000.000	3.107.680.125	36,81%
4.5	DIT. PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN	14.000.000.000	4.409.777.807	31,50%
5	632437 - DEPUTI BIDANG PENINDAKAN	44.708.170.000	16.701.414.946	37,36%
5.1	DIT. SIBER OBAT DAN MAKANAN	19.629.793.000	8.248.471.544	42,02%
5.2	DIT. INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN	7.482.810.000	2.666.390.181	35,63%
5.3	DIT. PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN	7.783.087.000	2.311.087.823	29,69%
5.4	DIT. CEGAH TANGKAL	9.812.480.000	3.475.465.398	35,42%
6	INSPEKTORAT UTAMA	26.901.038.000	12.391.347.708	46,06%
6.1	INSPEKTORAT I	19.865.993.000	8.729.942.210	43,94%
6.2	INSPEKTORAT II	7.035.045.000	3.661.405.498	52,05%

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
7	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	85.957.671.000	27.163.719.856	31,60%
8	PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN	24.027.920.000	5.503.133.599	22,90%
9	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	54.629.529.000	16.752.976.537	30,67%
10	PUSAT PENGEMBANGAN SDM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	51.102.191.000	17.972.429.857	35,17%
	TOTAL SATKER PUSAT	847.326.628.000	314.141.691.071	37,07%

B. BALAI BESAR / BALAI POM

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
1	TARAKAN	8.311.548.000	4.774.187.560	57,44%
2	SOFIFI	18.341.627.000	9.569.832.606	52,18%
3	PALEMBANG	30.567.108.000	14.906.860.333	48,77%
4	MATARAM	29.577.280.000	12.982.133.839	43,89%
5	KUPANG	34.488.493.000	14.649.473.824	42,48%
6	MANADO	32.068.897.000	13.439.017.991	41,91%
7	SEMARANG	55.272.377.000	22.448.522.620	40,61%
8	BANDUNG	61.356.815.000	24.915.392.791	40,61%
9	BENGKULU	28.666.120.000	11.338.563.060	39,55%
10	JAMBI	30.049.821.000	11.855.455.238	39,45%
11	JAKARTA	45.606.169.000	17.980.485.289	39,43%
12	PEKAN BARU	35.553.360.000	13.909.618.966	39,12%
13	AMBON	23.670.173.000	9.247.852.006	39,07%
14	BANDA ACEH	25.436.317.000	9.625.017.359	37,84%
15	SURABAYA	56.083.984.000	21.186.948.313	37,78%

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
16	GORONTALO	19.986.593.000	7.505.284.868	37,55%
17	SERANG	28.226.462.000	10.447.482.796	37,01%
18	DENPASAR	42.928.388.000	15.668.412.825	36,50%
19	YOGYAKARTA	40.612.643.000	14.012.138.924	34,50%
20	JAYAPURA	28.778.331.000	9.877.401.203	34,32%
21	MEDAN	48.138.392.000	16.517.833.540	34,31%
22	KENDARI	33.472.032.000	11.080.401.661	33,10%
23	PALU	25.894.138.000	8.508.237.643	32,86%
24	PONTIANAK	26.713.626.000	8.368.410.369	31,33%
25	BANDAR LAMPUNG	34.513.577.000	10.631.838.309	30,80%
26	MAKASSAR	56.353.243.000	17.312.212.454	30,72%
27	PANGKAL PINANG	20.982.118.000	6.205.764.007	29,58%
28	PALANGKARAYA	28.070.532.000	8.105.572.254	28,88%
29	BATAM	31.227.249.000	9.012.701.924	28,86%
30	PADANG	44.205.815.000	12.655.359.572	28,63%
31	SAMARINDA	32.711.174.000	8.744.962.441	26,73%
32	MAMUJU	22.014.685.000	5.764.099.401	26,18%
33	MANOKWARI	34.220.650.000	7.001.241.687	20,46%
34	BANJARMASIN	62.212.840.000	10.548.940.912	16,96%
	TOTAL SATKER BALAI	1.176.312.577.000	410.797.658.585	34,92%

C. LOKA POM

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
1	KABUPATEN BOGOR	4.903.984.000	2.491.032.018	50,80%
2	KABUPATEN BANYUMAS	5.040.938.000	2.502.502.343	49,64%
3	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	4.182.867.000	1.983.939.710	47,43%
4	KABUPATEN PULAU MOROTAI	3.491.105.000	1.589.755.268	45,54%
5	KABUPATEN TANAH BUMBU	3.748.220.000	1.698.878.667	45,32%
6	KABUPATEN BELITUNG	3.625.292.000	1.621.903.699	44,74%
7	KABUPATEN SANGGAU	3.869.372.000	1.725.824.942	44,60%
8	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	4.678.700.000	2.020.841.227	43,19%
9	KOTA PALOPO	5.018.555.000	2.142.506.474	42,69%
10	KOTA BALIKPAPAN	4.226.588.000	1.802.602.088	42,65%
11	KOTA SURAKARTA	5.296.346.000	2.224.129.844	41,99%
12	KABUPATEN KEDIRI	4.246.735.000	1.766.464.117	41,60%
13	KABUPATEN JEMBER	4.059.282.000	1.675.622.910	41,28%
14	KOTA DUMAI	5.091.155.000	2.081.403.037	40,88%
15	KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	4.484.194.000	1.826.295.979	40,73%
16	KABUPATEN TANGERANG	4.763.976.000	1.915.125.514	40,20%
17	KABUPATEN ENDE	5.447.310.000	2.172.012.003	39,87%
18	KOTA SUNGAI PENUH	4.034.348.000	1.606.901.741	39,83%
19	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	3.862.670.000	1.526.086.813	39,51%
20	KABUPATEN BIMA	4.244.097.000	1.629.055.531	38,38%
21	KABUPATEN MIMIKA	5.060.227.000	1.940.806.777	38,35%
22	KABUPATEN DHARMASRAYA	3.834.648.000	1.469.992.807	38,33%
23	KABUPATEN BANGGAI	3.603.510.000	1.368.455.133	37,98%
24	KOTA LUBUKLINGGAU	4.405.499.000	1.667.120.753	37,84%

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
25	KOTA TASIKMALAYA	6.096.857.000	2.284.114.391	37,46%
26	KOTA TANJUNGPINANG	4.516.592.000	1.662.783.065	36,81%
27	KOTA BAUBAU	5.645.698.000	2.002.908.416	35,48%
28	KABUPATEN SORONG	5.423.941.000	1.878.112.027	34,63%
29	KOTA TANJUNGBALAI	3.602.828.000	1.202.353.331	33,37%
30	KABUPATEN MERAUKE	3.690.198.000	1.218.400.290	33,02%
31	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	4.786.474.000	1.453.936.961	30,38%
32	KABUPATEN TULANGBAWANG	4.780.480.000	1.451.075.721	30,35%
33	KABUPATEN ACEH TENGAH	6.837.833.000	1.994.648.093	29,17%
34	KOTA PAYAKUMBUH	6.734.168.000	1.899.232.417	28,20%
35	KABUPATEN TOBA SAMOSIR	4.171.920.000	1.087.743.805	26,07%
36	KABUPATEN ACEH SELATAN	7.671.026.000	1.780.524.163	23,21%
37	KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	13.004.797.000	2.584.312.349	19,87%
38	KABUPATEN REJANG LEBONG	9.814.574.000	1.504.367.137	15,33%
39	KABUPATEN BULELENG	28.367.142.000	2.957.108.329	10,42%
	TOTAL SATKER LOKA	220.364.146.000	71.410.879.890	32,41%
	TOTAL SELURUH SATKER	2.244.003.351.000	796.368.910.584	35,49%



BADAN POM

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN II TAHUN 2022



Jl. Percetakan Negara
Jakarta Pusat 10560



021 4244691



halobpom@pom.go.id



www.pom.go.id



@bpom_ri



Bpom RI